

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**



SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO


Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026. Dokumen renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kebumen dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dokumen ini berisi program atau kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, berlandaskan visi dan misi Bupati Kebumen H. Arif Sugiyanto, SH dan Wakil Bupati Kebumen Hj. Ristawati Purwaningsih, SST, MM. Renstra BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan misi ke-5 Bupati dan wakil bupati terpilih yaitu Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat dengan Program Unggulan Daerah **Men Tambeng** Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Tersusunnya dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran BPBD Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Rencana Strategis ini, dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Kebumen yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Kebumen, September 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. MUNADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690907 199101 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistem Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM BPBD Kabupaten Kebumen	11
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	11
Tabel 2.3	Capaian kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	14
Tabel 2.4	Capaian Penanganan Kedaruratan	15
Tabel 2.5	Capaian Penanganan Pasca Bencana	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen	17
Tabel 2.7	Capaian Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen	18
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen	23
Tabel 3.1	Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Kebumen	32
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kab. Kebumen Tahun 2021-2022	46
Tabel 6.2	Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Tantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	59
Tabel 7.2	Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen	9
Gambar 2.2	Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Kebumen ...	10
Gambar 2.3	SDM BPBD Kab. Kebumen berdasar gender	10
Gambar 3.1	Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan kebakaran lahan, kegagalan teknologi. Daerah rawan tsunami membentang disepanjang pantai selatan Kabupaten Kebumen, terutama di wilayah yang terdapat muara sungai dari kecamatan Ayah sampai dengan kecamatan Mirit. Banjir dan tanah longsor juga merupakan ancaman yang cukup besar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen diantaranya kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Adimulyo, Sempor, Karangsembung, Alian, Karanggayam dan sebagian di wilayah Kecamatan Padureso. Selain banjir yang diakibatkan genangan, wilayah Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi bencana yang disebabkan karena kegagalan teknologi, yaitu kemungkinan banjir yang disebabkan jebolnya waduk Sempor dan Wadaslintang.

Selain ancaman yang berasal dari semua potensi bencana yang ada di kabupaten Kebumen, dimana secara topografi kabupaten Kebumen yang berada di wilayah pegunungan, dataran, serta pantai, perkembangan pembangunan infrastruktur berupa jalan di sebelah utara dan selatan kabupaten Kebumen, telah memicu pertumbuhan kegiatan perekonomian, pertanian/perkebunan, pariwisata dan perumahan disekirarnya, maka perencanaan mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk masuk kedalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kebumen 2021-2026, sebagai upaya mengurangi risiko manakala terjadi bencana.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen merupakan dokumen resmi yang disusun oleh BPBD Kabupaten Kebumen yang memuat rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan daerah selama 5 (lima) tahun, serta merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen. Upaya tersebut diwujudkan dengan pentahapan capaian pertahun melalui Renja Perangkat Daerah, sehingga kinerja terukur secara periodik,

dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 disusun dengan menganalisa hasil capaian kinerja renstra periode tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan kondisi terkini tentang potensi, peluang, dan tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi dengan disesuaikan pada Visi dan Misi Bupati terpilih serta selaras dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah penyusunan rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Renstra BPBD Kabupaten tahun 2021-2026 merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kebumen sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2026. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kebumen menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

1.2. Landasan Hukum.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kebumen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
2. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi BPBD Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Kebumen;
4. Memudahkan Seluruh jajaran pada BPBD Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra perangkat daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki perangkat daerah, mengemukakan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra kementerian / lembaga dan renstra BPBD provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terhadap renstra perangkat daerah, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN.

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidahpelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Kebumen berfungsi sebagai :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Kepala

Kepala BPBD Kabupaten Kebumen secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri atas :

- 1) Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD.
- 2) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga pemerintah terkait dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi Unsur Pengarah BPBD yaitu :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

c. Unsur Pelaksana.

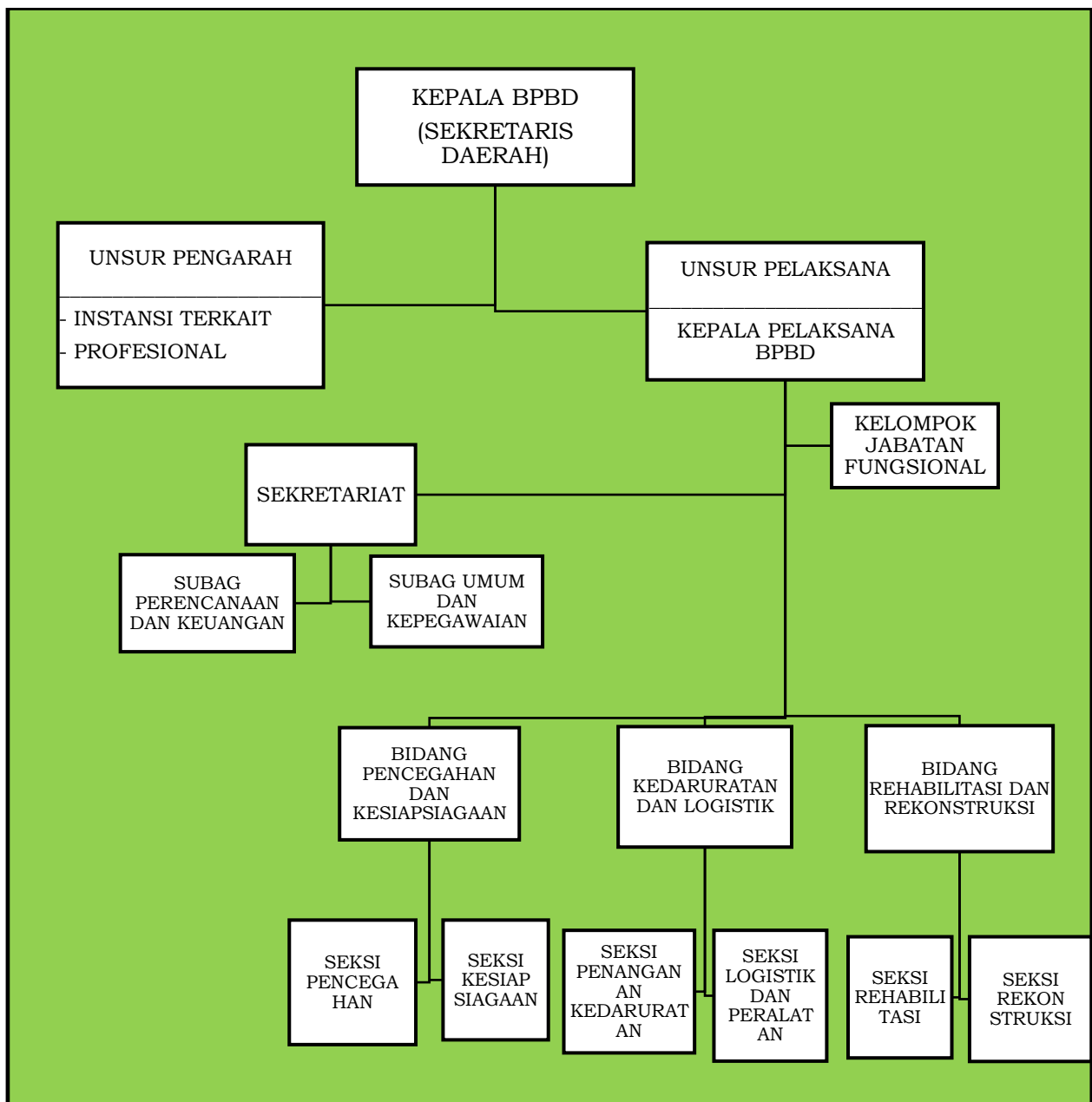
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan organisasi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen
- b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
- 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
- 1) Seksi Penanganan Kedaruratan
 - 2) Seksi Logistik dan peralatan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari
- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi
 - 2) Kepala Seksi Rekonstruksi

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen

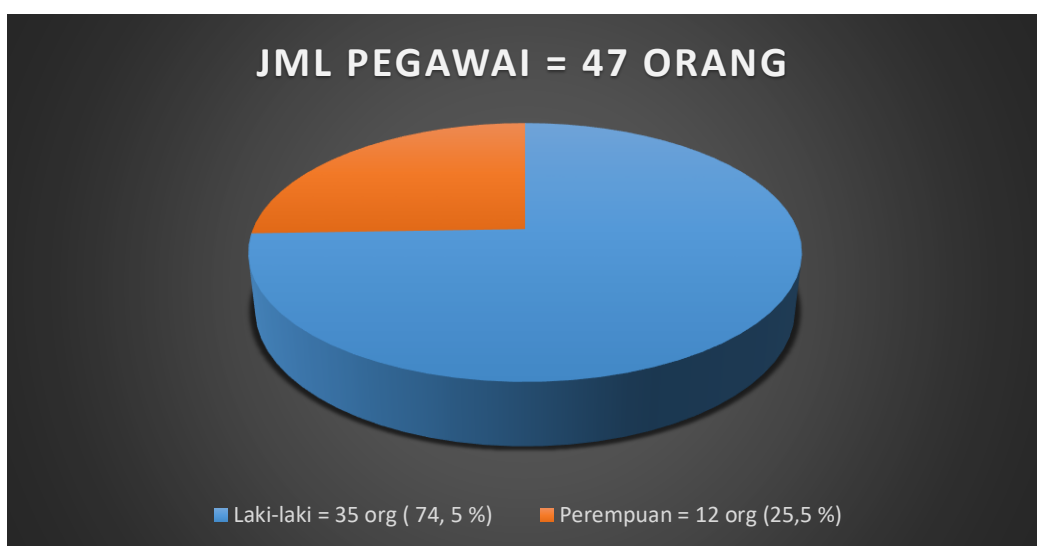
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Kebumen didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 47 personil, yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 24 orang (51%), tenaga harian lepas pendukung administrasi sejumlah 9 orang (19%) dan tenaga harian lepas pendukung operasional PUSDALOPS Penanggulangan Bencana sejumlah 14 orang (30%).



Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Kebumen berdasarkan gender, komposisi pegawai BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebagaimana gambar 2.3 sebagai berikut :



Gambar 2.3 SDM BPBD Kab. Kebumen berdasar gender

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh pegawai di BPBD Kabupaten Kebumen hanya sebesar 51% dari sejumlah 47 orang pegawai yang ada. Kekurangan pegawai yang terjadi selama ini di tutup dengan menggunakan tenaga bantu yaitu tenaga harian lepas (THL). Sedangkan apabila dilihat dari sisi gender, jumlah pegawai pada BPBD Kabupaten Kebumen 74,5% berjenis kelamin laki-laki dan 25,4% berjenis kelamin perempuan. Untuk pegawai yang berstatus ASN yang berjenis kelamin perempuan hanya terdiri atas 3 orang dari 24 orang ASN yang ada.

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, Sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Kebumen tergambar sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 SDM BPBD Kabupaten Kebumen

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML
Es.II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Es.III	4	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	4
Es.IV		8	-	-	-	8		8	-	-	-	8
STAF ASN	-	3	8	-	-	11	-	1	9	1	-	11
STAF THL					23	23			23			23
JML	5	11	8	-	23	47	1	13	32	1		47
% dari JML total	10,6	23,4	17,02	0	48,9	100	2,1	27,6	68,08	2,1	0	100

2.2.2. Sumber daya Peralatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/dipergunakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

JENIS SARPRAS	KONDISI				Kebu tuan jangka 5 th	Perlu penamb ahan	Perlu pemeliha ran
	Baik	Rsk ringan	Rsk berat	jml			
Gedung	3	1	0	4	2	1	2
Gudang Logistik	0	0	0	0	1	1	0
Mushola	0	0	0	0	1	1	0
Garasi Kendaraan	2	1	0	3	1	1	1
Mobil jabatan	1	2	0	3	1	1	2
Mobil operasional double cabin / 4WD	1	0	1	2	0	1	2

Mobil operasional station	1	0	0	1	2	1	1
Mobil pick up	0	2	0	2	1	1	2
Truk tanki	3	6	0	9	2	2	9
Truk serbaguna	1	0	0	1	1	0	1
Ambulance	1	0	0	1	1	1	1
Mobil Toilet	0	0	0	0	0	1	0
Sepeda motor jabatan (es.IV & III)	9	6	0	15	6	6	15
Sepeda motor SAR	1	0	0	1	0	0	1
Trail	0	4	2	6	2	2	4
Motor roda 3	0	1	0	1	0	0	1
Sepeda Gunung	1	0	0	1	0	0	1
Caravan	0	1	0	1	0	0	1
Perahu karet	3	1	4	8	8	3	5
Perahu Fiber	3	0	0	3	4	4	3
Mesin perahu	4	1	1	6	9	3	6
Komputer PC	15	0	4	19	20	3	17
Laptop/Notebook	12	0	4	16	20	6	14
LCD Proyektor	1	0	2	3	7	4	3
Kamera DSLR, mirrorless	3	0	0	3	0	0	3
Handy Cam	1	0	1	2	0	0	1
Lensa Tele	1	0	0	1	0	0	1
MegaPhone	3	0	0	3	4	4	3
Printer dot matrik	3	0	3	6	4	2	3
printer laserjet	4	0	0	4	5	1	4
printer deskjet	8	0	2	10	15	5	10
Sound system	1	1	0	2	3	1	2
AC	10	1	0	11	12	6	6
Referigerator	1	0	0	1	0	0	1
Tangga lipat	2	0	0	2	0	0	0
korden	2	0	0	2	2	1	0
rak Perahu	1	0	0	1	1	1	0
Rak mesin	1	0	0	1	2	1	0
Rak peralatan	0	0	0	0	9	9	0
pigura	0	0	0	0	25	25	0
Jam Dinding	0	0	0	0	20	20	0
Meubelair kantor	169	11	6	186	205	20	148
Meja/kursi eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Meja/Kursi eselon III/IV	11	1	0	12	12	0	12
Meja kerja staf	29	1	0	30	30	0	30
Kursi kerja Staf	23	0	5	28	28	0	18
Kursi rapat	65	5	0	70	70	0	65
Siches/sofa Tamu	0	2	1	3	4	0	3
Almari besi	6	0	0	6	0	0	6
Almari arsip	21	2	0	23	28	10	10

filing cabinet	10	0	0	10	20	10	0
Locker	9	0	0	9	12	0	9
Modular Office	1	0	0	1	1	0	0
EWS tsunami	17	0	0	17	5	5	14
EWS Longsor	14	4	0	18	50	50	18
EWS Banjir	0	0	3	3	10	10	3
DVB BMKG	1	0	0	1	1	0	1
Repeater Antena	3	0	0	3	2	2	3
Genset	3	1	0	4	5	0	5
Chain SAW	7	2	2	11	8	3	11
Water Treatment	1	0	0	1	1	0	1
Dapur Umum	6	0	0	6	0	0	6
Compresor BA	0	0	0	0	1	1	1
SCUBA	2	0	0	2	0	0	2
Teropong Medan	0	0	0	0	4	4	0
Drak Bar	9	0	0	9	9	0	8
Drak Bar Tube	0	0	0	0	4	4	0
VelBed	30	10	22	62	30	30	
Tenda Pengungsi	3	0	5	8	6	5	6
Tenda Peleton	2	0	0	2	4	2	2
Tenda Posko	3	0	0	3	6	3	3
Tenda Regu	3	0	0	3	3	0	3
Tenda Keluarga	8	0	0	8	0	0	10
Jaket Pelampung	125	0	47	172	100	100	0
Radio RIG	7	0	0	7	0	0	7
Handy Talky /HT	120	50	0	170	0	0	170
GPS location	2	0	0	2	3	3	0
Torpedo Buoy	0	0	0	0	24	24	0
Papan Rescue	0	0	0	0	8	8	0
Pompa Apung	1	1	0	2	4	2	2
Pompa AIR	20	4	0	24	15	0	0
Pemotong baja	2	0	0	2	0	0	2
Lampusorot	6	0	0	6	0	0	6
Lampu Stand	1	0	0	1	0	0	1
Rijing	1	0	0	1	0	0	1
Mesin Bor	1	0	0	1	0	0	1
Mesin cuci semprot	2	0	2	4	2	2	2
Kompresor	0	1	0	1	0	0	1

Berdasarkan data ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi BPBD Kabupaten Kebumen diatas, maka BPBD Kabupaten kebumen masih sangat memerlukan adanya gudang logistik yang representatif dan memadai untuk menampung banyaknya jenis barang barang logistik dan peralatan yang ada, termasuk rak penyimpanan logistik tersebut.

Sedangkan untuk kendaraan operasional, berdasarkan data diatas diperlukan peremajaan bagi kendaraan yang sudah rusak berat, termasuk pemeliharaan rutin bagi yang rusak ringan, termasuk dimungkinkan pengadaan kendaraan baru. Kendaraan operasional yang sangat perlu untuk dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kebumen yaitu mobil toilet, mengingat selama ini untuk memenuhi kebutuhan mobil toilet pada saat tertentu, masih selalu meminjam dari BPBD Kabupaten Cilacap.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 6 tahun renstra 2016-2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan penanggulangan bencana sebagai berikut :

2.3.1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam rangka kegiatan PraBencana, upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan yaitu dengan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Capaian kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO	Indikator kegiatan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pembentukan Desa tangguh Bencana	27	4	4	25	10	70
2	Penyusunan Peta risiko Bencana	8	2	2	6	6	24
3.	Pembangunan EWS Tsunami	10	0	0	4	3	17
4.	Papan Rambu/informasi	73	0	33	85	68	259
5	Sekolah Aman Bencana	30	5	3	5	0	43
6	Gladi Kebencanaan	1.200	-	50.600	400	300	52.500
7	Pelatihan Aparat/SAR	-	140	50	50	60	300
8	Renkon bencana	1	1	-	2	0	4
9	KRB DAN RPB	-	-	-	-	2	2

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang merupakan tahapan pra-bencana selama periode renstra yang lalu, secara umum sudah terlaksana sesuai dengan perencanaannya,

akan tetapi pada tahun-tahun terakhir periode renstra 2016-2021, yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pembentukan Sekolah Aman bencana tidak dilaksanakan di karenakan pandemi COVID-19 dimana kegiatan pembelajaran di sekolah di tiadakan.

2.3.2. Penanganan Kedaruratan, logistik dan peralatan.

Pelayanan penanggulangan Bencana dalam rangka tanggap darurat yang telah dilaksanakan dalam renstra 2016-2021 sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Capaian Penanganan Kedaruratan

No	Indikator kegiatan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Droping Air bersih	0	1060	1698	2452	34	5244
2	Evakuasi Berencana	139	537	475	337	744	2232

2.3.3. Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pasca bencana melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, upaya yang telah dilaksanakan yaitu melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan kembali yang lebih baik sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Capaian Penanganan Pasca Bencana

No	Indikator kegiatan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rehab jalan/Jembatan	7	1	2	1	1	12
2	Rehab Tebing sungai	7	1	2	2	5	17
3	Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah	-	-	70	19	143	232

Pelaksanaan penanganan pasca bencana yang dilaksanakan oleh BPBD kabupaten kebumen melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana yang meliputi infrastuktur jalan/jembatan dan tebing/tanggul sungai dilaksakan hanya atas

dasar kejadian bencana yang menimbulkan kerusakan yang cukup besar kerugiannya dan tidak dapat ditangani melalui kegiatan tanggap darurat. Adapun untuk pemberian bantuan perbaikan rumah, diberikan kepada rumah yang tertimpa bencana dan hanya merupakan bantuan stimulan untuk meringankan beban korban bencana yang mengalami kerusakan pada tempat tinggalnya.

2.3.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Renstra tahun 2016-2021, indikator IKU yang diangkat oleh BPBD Kabupaten Kebumen, ialah Presentase terbentuknya desa tangguh bencana sebesar 45,7 % dari 210 desa rawan bencana yang ada di kabupaten Kebumen atau sebanyak 95 desa. Pada akhir periode renstra 2016-2021, target yang direncanakan telah tercapai.

Dengan di terbitkannya Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan Penanggulangan Bencana di kabupaten Kebumen, baru mengupayakan pencapaian SPM mulai pada tahun 2019. Adapun pelayanan minimal yang wajib di berikan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana meliputi tiga layanan sebagai berikut :

1. pelayanan informasi rawan bencana;
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah, SPM serta Pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam renstra 2016-2021 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Desa Siaga/ Tangguh Bencana		45,7%		10%	17,1 %	24,2 %	31,4 %	38,5 %	45,7 %	11,9 %	13,8 %	16,67 %	28,5%	33,3 %	45,7%	119%	80,7%	68,8%	90,7%	86,4%	100%
2	Prosentase capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah			96%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	92,1%	87%	87,51 %	87,95 %	87,95 %		101%	94,5%	94,08 %	93,51 %	92,57 %	
3	pelayanan informasi rawan bencana	100%			0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	15,69 %	68,38 %	68,98 %	0	0	0	16,69 %	68,38 %	68,98%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	51,33 %	68,01 %	68,03 %	0	0	0	51,33 %	68,01 %	68,03%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0	100%	100%	100%

(*) kegiatan sedang berjalan

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 diatas, indikator capaian yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 ialah terbentuknya desa tangguh bencana sebanyak 95 desa dari 210 desa rawan bencana (45,7%) dengan akan tercapai seluruhnya 100% di tahun 2021, dengan rincian 70 desa telah dicapai sampai dengan tahun 2020 dan 25 desa dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Capaian Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DESTANA		TAHUN PEMBENTUKAN DAN SUMBER DANA	
					APBD KAB	APBN
1	KEC. AYAH	DS. AYAH	1	Desa	2015	0
		DS. KARANGDUWUR	1	Desa	2018	0
		DS. PASIR	1	Desa	2018	0
		DS. ARGOPENI	1	Desa	2019	0
		DS. CANDIRENGGO	1	Desa	2019	0
		DS. KEDUNGWERU	1	Desa	2020	0
		DS. BULUREJO	1	Desa	2020	0
		DS. JINTUNG	1	Desa	2010	0
2	KEC. BUAYAN	DS. KARANGBOLONG	1	Desa	2019	0
		DS. JLADRI	1	Desa	2019	0
		DS. PAKURAN	1	Desa	2020	0
3	KEC. PURING	DS. SIDOBUNDER	1	Desa	0	2013
		DS. MADUREJO	1	Desa	2015	0
		DS. TAMBAKMULYO	1	Desa	2014	0
		DS. SUROREJAN	1	Desa	2019	0
		DS. WALUYOREJO	1	Desa	2019	0
		DS. SIDOHARJO	1	Desa	2019	0
		DS. BUMIREJO	1	Desa	2019	0
		DS. TAMBAKMULYO	1	Desa	2019	0
4	KEC. PETANAHAN	DS. KARANGGADUNG	1	Desa	0	2014

		DS. MUNGGU	1	Desa	0	2014
		DS. KARANGREJO	1	Desa	2017	0
		DS. TEGALRETNO	1	Desa	2017	0
5	KEC. KLIRONG	DS. TANGGULANGIN	1	Desa	2014	
		DS. JOGOSIMO	1	Desa	2017	
6	KEC. BULUSPESANTREN	DS. SETROJENAR	1	Desa	2015	0
		DS. AYAM PUTIH	1	Desa	2019	0
		DS. BRECONG	1	Desa	2019	0
7	KEC. AMBAL	DS. KAIBON PETANGKURAN	1	Desa	2016	0
		DS. KENOYOJAYAN	1	Desa	2017	0
		DS. ENTAK	1	Desa	2018	0
		DS. KAIBON	1	Desa	2019	0
		DS. SUMBERJATI	1	Desa	2019	0
		DS. AMBALRESMI	1	Desa	2019	0
8	KEC. MIRIT	DS. LEMBUPURWO	1	Desa	2016	0
		DS. TLOGODEPAOK	1	Desa	2018	0
		DS. MIRIT	1	Desa	2019	0
		DS. MIRIT PETIKUSAN	1	Desa	2019	0
		DS. WIROMARTAN	1	Desa	2019	0
9	KEC. BONOROWO	DS. BALOREJO	1	Desa	0	2013
		DS. PUJODADI	1	Desa	2016	0
10	KEC. PREMBUN	0	0	Desa	0	0
12	KEC. KUTOWINANGUN	0	0	Desa	0	0
13	KEC. PONCOWARNO	DS. BLATER	1	Desa	2018	0
14	KEC. KEBUMEN	0	0	Desa	0	0
15	KEC. PEJAGOAN	DS. PENIRON	1	Desa	2013	0
		DS. PRIGI	1	Desa	2013	0
		DS. WATULAWANG	1	Desa	2013	0
		DS. KARANGPOH	1	Desa	2019	0
16	KEC. SRUWENG	DS. SIDOAGUNG	1	Desa	2019	0
		DS. PAKURAN	1	Desa	2020	0

17	KEC. ADIMULYO	DS. SIDOMUKTI	1	Desa	0	0
		DS. ADIMULYO	1	Desa	0	0
		DS. SUGIHWARAS	1	Desa	2020	0
18	KEC. KUWARASAN	DS. SIDOMUKTI	1	Desa	2015	0
19	KEC. ROWOKELE	DS. ROWOKELE	1	Desa	2020	0
20	KEC. SEMPOR	DS. KENTENG	1	Desa	0	2016
		DS. SAMPANG	0	Desa	0	0
		DS. DONOROJO	0	Desa	0	0
21	KEC. GOMBONG	0	0	Desa	0	0
22	KEC. KARANGANYAR	DS. GIRIPURNO	1	Desa	2020	0
23	KEC. KARANGGAYAM	DS. KARANGGAYAM	1	Desa	2016	0
		DS. KALIREJO	1	Desa	2018	0
		DS. KAJORAN	1	Desa	2020	0
24	KEC. SADANG	DS. SEBORO	1	Desa	2018	0
		DS. KEDUNGGONG	1	Desa	2019	0
25	KEC. KARANGSAMBUNG	DS. KALIGENDING	1	Desa	2014	0
		DS. KARANGSAMBUNG	1	Desa	2018	0
		DS. WADASMALANG	1	Desa	2020	0
26	KEC. PONCOWARNO	DS. SOKA	1	Desa	2019	0
		DS. BLATER	1	Desa	2018	0
27	KEC. PADURESO	DS. RAHAYU	1	Desa	2019	0
		DS. MERDEN	1	Desa	2019	0
28	KEC. ALIAN	DS. WONOKROMO	1	Desa	2019	0
		DS. KRAKAL	1	Desa	2019	0
		DS. KALIRANCANG	1	Desa	2020	0
			JUMLAH	70		

Untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian indikator ketangguhan desa dalam hal penanggulangan bencana, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Penilaian Ketangguhan Desa di 460 desa/kelurahan di

kabupaten Kebumen, sebagai lanjutan atas kegiatan ekspedisi desa tangguh bencana (destana) tsunami tahun 2019 oleh BNPB di sepanjang pesisir selatan pulau jawa, yang dimulai dari Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sampai dengan Pandegelang Provinsi Jawa Barat. Momentum inilah yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Penilaian ketangguhan bencana di kabupaten kebumen pada tahun 2020 dengan dilakukan pada semua desa, baik yang telah dibentuk menjadi Desa Tangguh Bencana melalui anggaran dan kegiatan di BPBD Kabupaten Kebumen, maupun desa belum mendapatkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana oleh BPBD Kabupaten Kebumen. Penilaian ketangguhan desa ini berawal dari dibentuknya Relawan Jogo Tonggo dalam rangka penanganan bencana Non Alam (COVID-19) di seluruh desa di Kabupaten Kebumen, dimana relawan yang ada di desa merupakan salah satu indikator suatu desa menjadi desa tangguh bencana walaupun masih pada tahap Pratama.

Klasifikasi Desa Tangguh Bencana berdasarkan hasil Penilaian Ketangguhan Desa yang telah dilaksanakan pada seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupten Kebumen sebagai berikut :

- a. Desa Tangguh Bencana Utama sebanyak 3 desa.
- b. Desa Tangguh Bencana Madya sebanyak 110 desa
- c. Desa Tangguh Bencana Pratama sebanyak 347 desa.

Pada Renstra tahun 2021-2026, indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah BPBD Kabupaten Kebumen ialah Persentase desa tangguh bencana 100% sampai dengan tahun 2026. Target capaian indikator yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2026 ialah dengan menjadikan semua desa yang memiliki risiko bencana yang tinggi, menjadi desa tangguh Bencana dengan kriteria Utama, sedangkan untuk desa yang berrisiko sedang dan rendah menjadi Desa tangguh dengan kriteria Madya.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana.

Pencapaian target indikator SPM sub-urusan bencana sampai dengan akhir periode renstra 2016-2021 sebagaimana tabel 2.6 diatas yang terdiri atas 3 layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana sebesar 68,38 %.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 68,01 %.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%

Capaian SPM sub-urusan bencana pada periode renstra tahun 2016-2021 belum semuanya tercapai 100%, hal ini disebabkan masih ditemuinya kendala dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Penentuan jumlah penduduk yang berada di kawasan bencana yang saat ini di jadikan data base, belum berdasarkan data riil berdasarkan hasil penghitungan /pendataan di wilayah rawan bencana.
- b. banyaknya jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana menyebabkan anggaran untuk peningkatan kapasitas masyarakat juga semakin banyak jumlahnya.
- c. banyaknya jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana yang terdiri dari berbagai macam hazard yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana menyebabkan jumlah peralatan perlindungan akibat bencana juga semakin banyak ragam dan jenisnya.
- d. Ancaman bencana di kabupaten Kebumen yang terdiri dari 9 jenis ancaman, mengharuskan BPBD kabupaten Kebumen mengadakan Gladi kebencanaan sesuai dengan jenis ancaman kepada semua penduduk yang berada dalam kawasan rawan bencana.

Evaluasi penggunaan Anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dalam periode renstra tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen

Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	%	%	%	%	%	Rp.000	Rp.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.084.500	954.614	1.152.652	893.010	1.202.674	972.382	781.754	988.551	824.604	1.021.151	89,66%	81,89%	85,76%	92,34%	84,91%	1.057.490	86,91%
Penyediaan jasa surat menyurat	4.500	4.900	5.364	1.600	3.000	3.959	4.202	4.694	1.491	2.973	87,98%	85,76%	87,51%	93,19%	99,10%	3.873	90,71%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000	50.000	55.000	58.060	83.800	43.409	35.220	41.487	48.524	65.693	96,46%	70,44%	75,43%	83,58%	78,39%	58.372	80,86%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50.000	50.000	60.000	58.300	60.000	47.644	39.025	36.599	58.139	55.807	95,29%	78,05%	61,00%	99,72%	93,01%	55.660	85,41%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	450.000	313.879	415.848	272.060	291.307	372.346	237.726	328.774	221.260	247.506	82,74%	75,74%	79,06%	81,33%	84,96%	348.619	80,77%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.000	60.000	70.000	71.735	216.067	66.115	54.278	69.817	71.301	214.246	94,45%	90,46%	99,74%	99,39%	99,16%	97.560	96,64%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	38.500	41.935	40.000	34.657	50.000	32.763	36.987	39.716	33.452	48.562	85,10%	88,20%	99,29%	96,52%	97,12%	41.018	93,25%
Penyediaan alat tulis kantor	49.500	49.500	50.000	49.510	100.000	44.018	44.018	47.282	45.971	89.158	88,93%	88,93%	94,56%	92,85%	89,16%	59.702	90,88%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.000	36.000	39.136	29.706	60.000	32.747	35.419	38.529	29.505	58.327	99,23%	98,39%	98,45%	99,32%	97,21%	39.568	98,52%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000	4.000	12.000	4.951	8.000	4.595	3.809	11.996	4.882	7.650	91,90%	95,23%	99,97%	98,61%	95,63%	6.790	96,26%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000	4.400	5.251	4.951	3.500	3.909	3.526	3.286	3.293	3.293	97,73%	80,14%	62,58%	66,51%	94,09%	4.420	80,21%

Penyediaan makanan dan minuman	30.000	40.000	35.083	40.796	50.000	25.854	37.715	35.068	40.470	46.373	86,18%	94,29%	99,96%	99,20%	92,75%	39.176	94,47%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000	220.000	248.160	212.174	200.000	218.258	205.983	246.858	211.846	139.958	97,00%	93,63%	99,48%	99,85%	69,98%	221.067	91,99%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	80.000	80.000	116.810	54.510	77.000	76.765	43.846	84.445	54.470	41.605	95,96%	54,81%	72,29%	99,93%	54,03%	81.664	75,40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	827.000	1.617.113	1.212.500	121.249	336.000	768.813	1.610.817	1.200.409	115.064	287.752	92,96%	99,61%	99,00%	94,90%	85,64%	822.772	94,42%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	540.000	1.270.000	750.000	43.024	-	485.085	1.268.900	747.064	38.306	-	89,83%	99,91%	99,61%	89,03%	0,00%	520.605	75,68%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.000	40.000	50.000	24.085	60.000	36.784	38.500	49.990	23.980	49.810	99,42%	96,25%	99,98%	99,56%	83,02%	42.217	95,65%
Pengadaan peralatan gedung kantor	75.000	82.113	85.000	25.425	70.000	73.718	79.990	80.917	25.260	62.210	98,29%	97,41%	95,20%	99,35%	88,87%	67.508	95,82%
Pengadaan mebeleur	100.000	-	120.000	-	-	98.228	-	116.501	-	-	98,23%	0,00%	97,08%	0,00%	0,00%	44.000	39,06%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000	225.000	200.000	28.715	200.000	69.998	223.427	198.477	27.518	170.162	100,00%	99,30%	99,24%	95,83%	85,08%	144.743	95,89%
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000	-	7.500	-	6.000	5.000	-	7.460	-	5.570	100,00%	0,00%	99,47%	0,00%	92,83%	3.700	58,46%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000	25.000	55.000	-	-	113.645	6.908	54.000	-	-	98,82%	27,63%	98,18%	0,00%	0,00%	39.000	44,93%
Pendidikan dan pelatihan formal	115.000	25.000	55.000	-	-	113.645	6.908	54.000	-	-	98,82%	27,63%	98,18%	0,00%	0,00%	39.000	44,93%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100.000	-	-	-	-	96.643	-	-	-	-	96,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.000	19,33%

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100.000	-	-	-	-	96.643	-	-	-	-	96,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.000	19,33%
Program pengembangan data/informasi	28.000	70.000	70.000	167.484	302.660	27.426	55.103	51.009	161.337	267.500	97,95%	78,72%	72,87%	96,33%	88,38%	127.629	86,85%
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	28.000	20.000	20.000	19.804	37.660	27.426	19.357	19.856	19.380	36.970	97,95%	96,79%	99,28%	97,86%	98,17%	25.093	98,01%
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	-	50.000	50.000	147.680	265.000	-	35.746	31.153	141.957	230.530	0,00%	71,49%	62,31%	96,12%	86,99%	102.536	63,38%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.000.000	2.473.567	2.591.600	1.992.700	4.070.357	1.785.085	2.425.248	2.487.615	1.551.025	4.017.739	89,25%	98,05%	95,99%	77,84%	98,71%	2.625.645	91,97%
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	2.000.000	2.230.535	2.316.600	1.806.870	3.955.357	1.785.085	2.185.150	2.235.653	1.371.269	3.903.160	89,25%	97,97%	96,51%	75,89%	98,68%	2.461.872	91,66%
Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	-	243.032	275.000	185.830	115.000	-	240.098	251.962	179.756	114.579	0,00%	98,79%	91,62%	96,73%	99,63%	163.772	77,36%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	937.200	100.000	130.000	89.118	4.500	931.796	72.995	125.177	87.396	4.400	99,42%	73,00%	96,29%	98,07%	97,78%	252.164	92,91%
Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan	937.200	100.000	130.000	89.118	4.500	931.796	72.995	125.177	87.396	4.400	99,42%	73,00%	96,29%	98,07%	97,78%	252.164	92,91%

kenyamanan lingkungan																	
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.262.755	1.241.057	1.608.600	2.172.860	2.069.498	899.612	935.594	1.459.428	5.084.772	1.523.121	71,24%	75,39%	90,73%	234,01%	73,60%	1.670.954	108,99%
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	350.000	180.855	300.000	546.570	300.000	343.437	156.713	260.875	527.919	295.436	98,12%	86,65%	86,96%	96,59%	98,48%	335.485	93,36%
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	100.000	-	121.000	124.482	117.800	87.116	-	118.200	122.195	116.603	87,12%	0,00%	97,69%	98,16%	98,98%	92.656	76,39%
Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	120.000	282.402	168.000	-	50.000	116.314	208.670	157.137	-	48.960	96,93%	73,89%	93,53%	0,00%	97,92%	124.080	72,45%
Droping Air Bersih	300.000	315.000	350.000	346.570	350.000	-	193.667	340.165	307.037	23.724	0,00%	61,48%	97,19%	88,59%	6,78%	332.314	50,81%
Pelatihan penanggulangan bencana	100.000	115.000	70.000	24.755	100.000	78.309	108.620	61.158	24.338	94.048	78,31%	94,45%	87,37%	98,32%	94,05%	81.951	90,50%
Penyusunan peta resiko rawan bencana	100.000	100.000	100.000	204.786	205.045	93.184	67.521	77.441	204.180	193.216	93,18%	67,52%	77,44%	99,70%	94,23%	141.966	86,42%
Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	192.755	150.000	419.600	745.657	846.653	181.252	141.443	384.257	738.739	654.188	94,03%	94,30%	91,58%	99,07%	77,27%	470.933	91,25%
Fasilitasi Forum PRB dan relawan		97.800	80.000	180.040	100.000		58.960	60.195	160.364	96.946	0,00%	60,29%	75,24%	89,07%	96,95%	91.568	64,31%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000	10.000	10.000	8.582	15.000	10.120	9.834	9.880	8.479	13.954	101,20%	98,34%	98,80%	98,80%	93,03%	10.716	98,03%
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	10.000	10.000	10.000	8.582	15.000	10.120	9.834	9.880	8.479	13.954	101,20%	98,34%	98,80%	98,80%	93,03%	10.716	98,03%

Program tanggap darurat jalan dan jembatan	10.582.036	985.000	2.050.000	1.079.200	3.255.000	10.120.935	700.116	1.599.287	944.184	3.119.207	95,64%	71,08%	78,01%	87,49%	95,83%	3.590.247	85,61%
Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	10.582.036	985.000	2.050.000	1.079.200	3.255.000	10.120.935	700.116	1.599.287	944.184	3.119.207	95,64%	71,08%	78,01%	87,49%	95,83%	3.590.247	85,61%
Program pengendalian banjir	3.812.135	832.000	1.750.000	1.025.080	978.000	3.258.543	592.437	1.349.058	830.971	963.883	85,48%	71,21%	77,09%	81,06%	98,56%	1.679.443	82,68%
Pembangunan infrastruktur pengairan pasca bencana alam	3.812.135	832.000	1.750.000	1.025.080	978.000	3.258.543	592.437	1.349.058	830.971	963.883	85,48%	71,21%	77,09%	81,06%	98,56%	1.679.443	82,68%
Program Perbaikan Rumah akibat bencana alam/sosial	200.000	200.718	242.000	184.900	200.000	189.635	186.702	207.080	183.017	198.406	94,82%	93,02%	85,57%	98,98%	99,20%	205.524	94,32%
Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	200.000	200.718	242.000	184.900	200.000	189.635	186.702	207.080	183.017	198.406	94,82%	93,02%	85,57%	98,98%	99,20%	205.524	94,32%

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 diatas, terdapat program/kegiatan yang pelaksanaannya tidak berkesinambungan yang disebabkan beralihnya urusan Pemadam Kebakaran dari BPBD Kabupaten Kebumen ke SATPOL-PP. Selain itu terdapat kegiatan yang setiap tahun di anggarkan akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan rencana sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran hanya terealisasi di BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2016, sedangkan semenjak tahun 2017 s/d 2021 sudah menjadi tugas pokok dan fungsi SATPOL-PP.
- b. Droping Air Bersih
Kegiatan droping air bersih yang selalu di alokasikan anggaran setiap tahun pada tahun 2016 tidak dilaksanakan karena tidak terjadi kekeringan, demikian juga pada tahun 2020 realisasinya sangat kecil, dikarenakan pada musim kemarau tidak terjadi krisis air bersih.
- c. Kegiatan Pendidikan Formal pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi COVID-19, termasuk kegiatan yang salah satu keluarannya Sekolah Aman bencana juga dibatalkan.
- d. Kegiatan Pengadaan Meubelair serta pemeliharannya terdapat realisasi yang 0 % sudah disesuaikan dengan perencanaan (tidak setiap tahun di laksanakan).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1. Tantangan pelayanan perangkat daerah

Penyelenggaran penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Topografi wilayah kabupaten kebumen yang terdiri atas pegunungan, dataran dan pantai secara umum merupakan tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten kebumen. Adapun secara spesifik tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, di tandai dengan semakin seringnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor, serta kekeringan pada musim yang kecenderungannya secara umum semakin meningkat.
- c. Pembangunan pemukiman oleh penduduk yang berada di kawasan pegunungan semakin meningkatkan risiko baik kekeringan maupun tanah longsor
- d. Peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, masih sangat bergantung kepada pemerintah Daerah, yang dalam hal ini BPBD Kabupaten Kebumen.
- e. Adanya keterbatasan sarana komunikasi, dimana frekuensi radio RIG belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, sehingga menghambat komunikasi ketika dalam kondisi tanggap darurat.
- f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana, terutama dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- g. Siklus penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap Pra-Bencana melalui kegiatan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat berlanjut pada penanganan Pasca Bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah , meliputi:

- a. Adanya aturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dikabupaten kebumen yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 4. Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.
 6. Perda Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Adanya kelembagaan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen yang mulai terkelola dengan baik, sebagai berikut :
1. Telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, yang mempunyai tugas untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat, serta bersama sama turut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing unsur.
 2. Dukungan dari lembaga terkait penanggulangan bencana yang sangat baik dari PMI Kabupaten Kebumen, BAZNAS Kabupaten Kebumen serta Relawan telah menjadi kekuatan yang dimiliki pemerintah kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan dalam SDGs yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ialah tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim yaitu dengan mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan target :
1. Memperkuat daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam.

2. Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan di daerah.
3. Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana kabupaten Kebumen, yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, di wilayah kabupaten Kebumen yang secara topografi terdiri atas pegunungan, dataran dan juga pantai, serta memiliki banyak sungai dan 2 waduk, menjadikan Kabupaten Kebumen termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ancaman bencana yang tinggi dengan jenis ancaman bencana sebagaimana tabel 3.1 berikut :

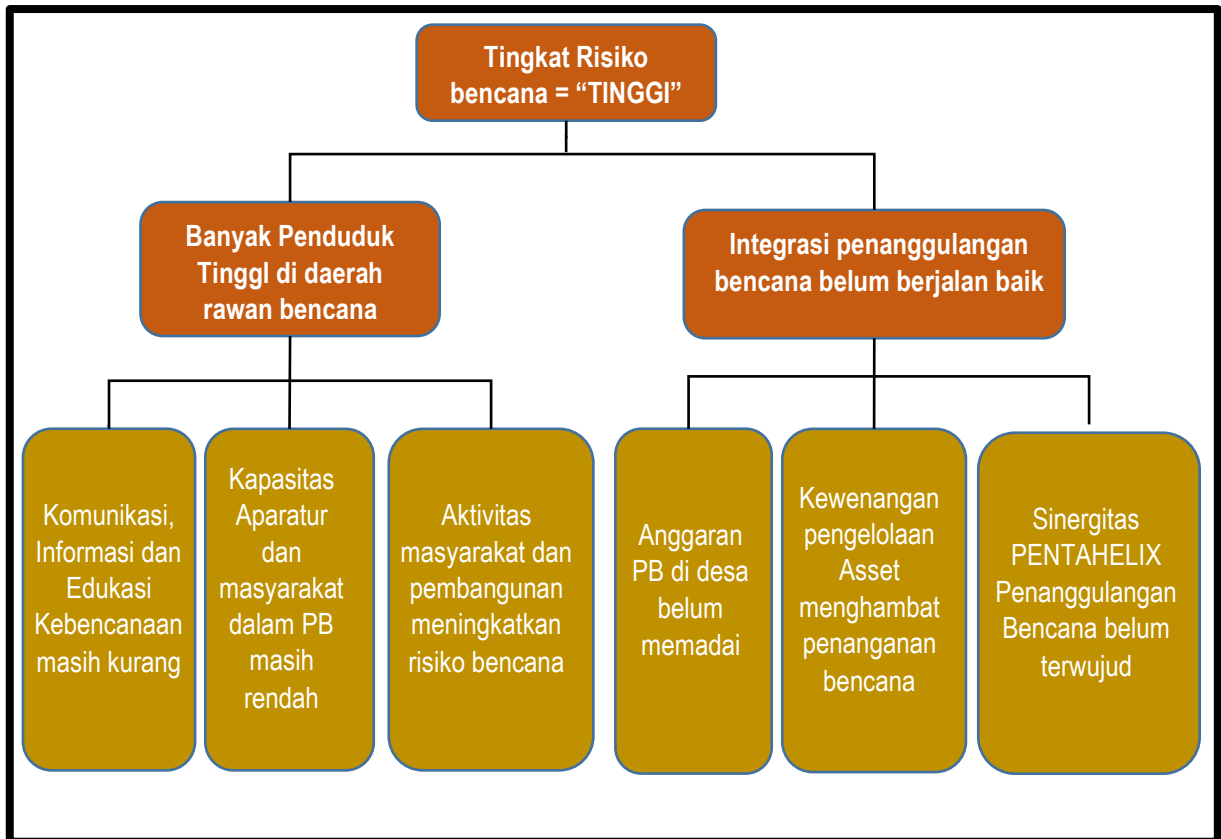
Tabel 3.1 Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Desa Terancam			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Gelombang Ekstrem	17	4	10	31
2	Tsunami	35	10	48	93
3	Tanah Longsor	85	75	96	256
4	Banjir	101	224	23	348
5	Banjir Bandang	19	7	176	202
6	Angin Kencang	6	13	113	132
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	59	70	101	230
8	Gempabumi	244	195	0	439
9	Kekeringan	15	72	6	93

Ancaman bencana yang tergambar pada tabel di atas, harus diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi. Upaya mitigasi bencana harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah Kabupaten maupun oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa masing-masing. Di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan yang mengandung makna bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

BPBD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen sampai dengan saat ini masih menemui banyak hambatan dan kendala di dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kendala dan hambatan yang dihadapi BPBD kabupaten Kebumen tercermin dalam pemetaan masalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan permasalahan permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Kebumen, dapat di jelaskan pokok masalah sampai dengan akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kabupaten Kebumen memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi	Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	1. Pelayanan Informasi kerawanan bencana belum merata bagi penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. 2. Masih rendahnya kapasitas masyarakat

			<p>dan aparat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana</p> <p>3. Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko bencana</p>
		<p>Penanganan bencana yang merupakan urusan Bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha belum terlaksana dengan baik</p>	<p>1. Penanganan Kebencanaan belum didukung dengan anggaran yang memadai, terutama di Desa-desa.</p> <p>2. Kewenangan pengelolaan infrastruktur terkadang menghambat penanganan bencana</p> <p>3. Peran Dunia Usaha dalam rangka penanganan bencana masih minim</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Visi Bupati dan wakil bupati kebumen periode tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”** . BPBD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Penanggulangan Bencana dalam rangka mendukung misi ke-5 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat”. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

- dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai Perangkat Daerah pendukung kebijakan Bupati kebumen dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana daerah, BPBD Kabupaten Kebumen berfungsi sebagai :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Kebumen, upaya pencapaian visi bupati dan wakil bupati terpilih

dalam Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat melalui misi ke-5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat dengan Program “**Men Tambeng**” Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi :				
<i>Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat</i>				
No	Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I	Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
	Men Tambeng, Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Penanggulangan bencana memerlukan dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. 2. Sarpras kantor berupa Aula/Ruang pertemuan belum	1. Belum tersedianya Data Base Penduduk/warga masyarakat yang berada di kawasan bencana sesuai dengan hazard bencana yang ada. 2. Dukungan Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan anggaran kebencanaan dalam APBDesa	1. Kebijakan Bupati dan wakil bupati terpilih dengan menjadikan penanggulangan bencana sebagai program unggulan. 2. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) akan memberi dukungan bagi pemerintah kabupaten dalam

		memadai 3. Gudang Logistik yang memadai belum tersedia.	belum signifikan. 3. Budaya Kearifan Lokal sebagai upaya Pengurangan Risiko bencana yang mulai Pudar.	menentukan kebijakan penanggulangan bencana yang akan di ambil
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis tahun 2020-2024 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan Penguatan, penyusunan dan penyetaraan Regulasi, Penguatan Kapasitas para pihak dalam penanggulangan Bencana serta Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD kabupaten Kebumen dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun BNPB dan Kementerian Dalam negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kabupaten Kebumen.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Renstra Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa wilayah kabupaten Kebumen merupakan wilayah yang memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya bencana, selaras dengan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun. Kondisi ini menjadi pendorong bagi BPBD kabupaten Kebumen dalam menyusun Renstra 2021-2026 dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang keluarannya adalah berbagai upaya pengurangan risiko bencana sebagai berikut :

- a. mitigasi struktural melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dan lebih aman,
- b. mitigasi non-struktural melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Upaya Pengurangan Risiko bencana yang akan di lakukan tetap akan menemui hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan daya dukung lingkungan yang semakin menurun, terlihat dengan semakin seringnya banjir dan tanah longsor ketika musim hujan serta krisis air bersih pada musim kemarau.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, hasil Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, hasil telaahan sasaran jangka menengah dalam renstra K/L dan Provinsi, serta hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen dalam Renstra BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025 wilayah rawan bencana di kabupaten Kebumen terdapat pada 408 Desa (88,66%) dari 460 Desa/Kelurahan yang meliputi 9 hazard bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempabumi, Tsunami, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, dan banjir bandang. Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di kabupaten Kebumen, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak untuk di laksanakan.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana di kabupaten Kebumen, menjadi tantangan bagi BPBD kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

3. Peningkatan sinergitas PENTAHELIX Penanggulangan Bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat“ melalui Misi yang ke-5 Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana/pra-bencana, saat terjadinya bencana/tanggap darurat, maupun saat setelah terjadinya bencana/pasca bencana. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen inilah yang akan terus didorong oleh BPBD kabupaten Kebumen sebagai salah wujud kemandirian sesuai dengan frasa mandiri yang tercantum dalam pernyataan visi Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk mewujudkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka masyarakat desa yang berada di kawasan yang rawaan bencana harus ditingkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, maka diharapkan masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa mereka berada di daerah yang rawan bencana sehingga diharapkan agar masyarakat turut serta melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan kearifan lokal pada masing-masing desa perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten Kebumen. Kearifan lokal/budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan, gotong royong dalam penanggulangan bencana merupakan kebiasaan masyarakat kabupaten Kebumen yang semenjak dahulu sudah menjadi kebiasaan, sehingga perlu untuk ditumbuhkan kembali. Upaya inilah yang akan yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Kebumen dalam rangka turut melaksanakan misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati diatas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, khususnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen, telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah kabupaten Kebumen yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten Kebumen selama 5 tahun. BPBD kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati Kebumen dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
.	Tujuan 5.2: Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Indeks Kondusifitas Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 5.2.2 : Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/sasaran jangka menengah yang telah di tetapkan dalam tabel 4.1 di atas merupakan upaya mendukung program Unggulan Bupati dan Wakil bupati terpilih yaitu **“Men-Tambeng”** : Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan data diatas, Indikator Kinerja yang ditetapkan selanjutnya menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kebumen dalam renstra Tahun 2021-2026.

Untuk menuju sasaran terwujudnya wilayah tangguh bencana di kabupaten Kebumen, maka peningkatan kapasitas desa tangguh bencana yang telah dibentuk pada renstra yang lalu menjadi prioritas utama dalam renstra BPBD tahun 2021-2026. Desa tangguh bencana yang telah terbentuk akan selalu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga desa yang masuk dalam klasifikasi Desa Tangguh Utama dan madya semakin banyak, sedangkan Desa Tangguh Pratama semakin sedikit. Peningkatan

Kapasitas desa tangguh bencana akan diprioritaskan bagi desa-desa/kelurahan yang memiliki risiko bencana yang tinggi, dengan tidak mengesampingkan desa-desa/kelurahan yang berada di kawasan yang risiko bencananya rendah.

Berdasarkan aspek dan indikator kinerja bidang penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen oleh BPBD Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Penanganan Kedaruratan dan Pemenuhan Logistik serta pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang merupakan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana, ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Bidang Trantibum Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
1	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Penetapan Indikator Kinerja menurut bidang penyelenggaraan Pemerrintah Daerah diatas didasarkan pada lampiran permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah/Kota.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : <i>Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.</i>			
Misi V : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 5.2 : Mewujudkan kondusitivitas wilayah	Sasaran 5.2.2 : Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Strategi 5.2.2 : Peningkatan desa tangguh bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi kebencanaan yang Up-Date bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana 2. Mengoptimalkan kegiatan Pra-Bencana melalui Pencegahan dan kesiapsiagaan dengan mengedepankan peran Pentahelix Penanggulangan Bencana (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa) 3. Menyediakan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana yang responsif 4. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dengan selalu berkordinasi dengan stakeholder terkait dengan motto “ Build Back Better and Saver”

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026, yaitu :

1. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana merupakan program utama BPBD Kabupaten Kebumen dalam membantu tugas Bupati Kebumen dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen. Program ini berisikan kegiatan Pra Bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan Tanggap Darurat yang meliputi penanganan kedaruratan dan penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan serta kegiatan Pasca Bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan program berisikan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah, yang meliputi perencanaan perangkat daerah, administrasi keuangan berupa gaji dan tunjangan , administrasi umum berupa kegiatan rutin kantor, penyediaan sarana dan prasarana kantor, serta pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dana pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kabupten Kebumen dalam Renstra tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPBD KAB. KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab				
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
	BPBD					12.145.523.000		16.104.380.000		15.805.430.398		16.893.317.120		20.981.961.074		81.930.611.592					
MISI 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi																					
X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	4.106.923.000	100	5.439.298.000	100	4.445.847.000	100	4.726.848.000	100	8.431.150.000	100	27.150.066.000		
X	XX	1	2.01	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	4 dok	4	4	26.000.000	4	26.780.000	4	27.583.000	5	50.000.000	4	29.237.000	21	159.600.000	<i>Sekretariat</i>	
X	XX	1	2.01	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dok	4	4	26.000.000	4	26.780.000	4	27.583.000	5	50.000.000	5	29.237.000	22	159.600.000	Sekretariat
X	XX	1	2.02		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	12 bln	12	12	2.436.180.000	12	2.483.925.000	12	2.483.925.000	12	2.503.925.000	12	2.533.924.000	60	12.441.879.000	<i>Sekretariat</i>
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bln	12	12	2.203.924.000	12	2.223.925.000	12	2.223.925.000	12	2.223.925.000	12	2.253.924.000	60	11.129.623.000	Sekretariat

X	XX	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	12 bln	12	12	232.256.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	60	1.312.256.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	12	12	339.000.000	12	349.170.000	12	359.644.000	12	370.430.000	12	381.539.000	60	1.799.783.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12	12	15.000.000	12	15.450.000	12	15.913.000	12	16.390.000	12	16.881.000	60	79.634.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bln	12	12	60.000.000	12	61.800.000	12	63.654.000	12	65.563.000	12	67.529.000	60	318.546.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12	12	29.000.000	12	29.870.000	12	30.766.000	12	31.688.000	12	32.638.000	60	153.962.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	12	12	5.000.000	12	5.150.000	12	5.304.000	12	5.463.000	12	5.626.000	60	26.543.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	7	penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bln	12	12	50.000.000	12	51.500.000	12	53.045.000	12	54.636.000	12	56.275.000	60	265.456.000	Sekretariat
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di selenggarakan	12 bln	12	12	180.000.000	12	185.400.000	12	190.962.000	12	196.690.000	12	202.590.000	60	955.642.000	Sekretariat
X	XX	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 paket	5	2	772.999.000	4	1.765.347.000	2	944.457.000	5	72.600.000	2	72.600.000	15	3.628.003.000	Sekretariat

X	XX	1	2.07	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0	0	0	2	1.705.347.000	0	0	2	0	0	0	4	1705347000	Sekretariat
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah eubelair almari, meja, kursi karyawan, kursi rapat	2 paket	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	Sekretariat
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	3 paket	3	2	772.999.000	2	60.000.000	2	944.457.000	2	72.600.000	2	72.600.000	10	1.922.656.000	Sekretariat
X	XX	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12	12	175.000.000	12	186.500.000	12	188.045.000	12	200.636.000	12	202.275.000	60	952.456.000	Sekretariat
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	27.000.000	Sekretariat
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	490.000.000	Sekretariat
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	170.000.000	Sekretariat
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	12	12	50.000.000	12	51.500.000	12	53.045.000	12	54.636.000	12	56.275.000	60	265.456.000	Sekretariat
X	XX	1	2.05		Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	0	0	24	27.744.000	24	28.576.000	24	29.433.000	24	30.316.000	24	31.226.000		147.295.000	
X	XX	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	0	0	24	27.744.000	24	28.576.000	24	29.433.000	24	30.316.000	24	31.226.000	120	147.295.000	

X	XX	1	2.09		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bln	12	12	330.000.000	12	599.000.000	12	412.760.000	12	1.498.941.000	12	5.180.349.000	60	8.021.050.000	Sekretariat	
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln	12	12	300.000.000	12	309.000.000	12	318.270.000	12	327.818.000	12	337.652.000	60	1.592.740.000	Sekretariat	
X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	12 bln	12	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	45.000.000	Sekretariat	
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	12 bln	12			12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000	Sekretariat	
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	12 bln	1 paket	1	25.000.000	1	250.000.000	1	54.490.000	1	1.131.123.000	1	4.802.697.000	5	6.263.310.000	Sekretariat	
					URUSAN TRANTIBUMLINMAS														-	0		
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat																				-	0	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	8.038.600.000	100	10.665.082.000	100	11.359.583.398	100	12.166.469.120	100	12.550.811.074	500	54.780.545.592		
1	5	3	02.01		<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana</i>	100	100	100	400.000.000	100	512.000.000	100	424.360.000	100	437.090.000	100	550.202.000	500	2.323.652.000		
1	5	3	02.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	2	200.000.000	Bidang I	

1	5	3	02.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100		100	400.000.000	100	412.000.000	100	424.360.000	100	437.090.000	100	450.202.000	500	2.123.652.000	Bidang I	
1	5	3	02.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100	5.558.600.000	100	6.603.082.000	100	7.189.657.008	100	7.959.695.738	100	8.206.835.190	100	35.517.869.936		
1	5	3	02.02		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100% (1DOK)		0	0	2	150.000.000	0	0	2	150.000.000	0	0	4	300.000.000	Bidang I	
1	5	3	02.02		Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100% (1DOK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang I
1	5	3	02.02	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota	jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang ikut pelatihan			100	50.000.000	125	75.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	825	425.000.000	Bidang I	
1	5	3	02.02	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pus dalops penanggulangan bencana dan sarana pra sarana penanggulangan bencana			100	350.000.000	100	360.500.000	100	371.314.000	100	382.453.000	100	393.926.000	100	1.858.193.000	Bidang II	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah paket bagi Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan			1	325.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	5	1.700.000.000	Bidang II	

1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan terkelolanya risiko bencana kabupaten			12	250.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	450.000.000	Bidang I
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase pembentukan desa tangguh bencana			100	1.000.000.000	100	682.158.600	100	714.623.008	100	748.061.538	100	782.502.904	100	3.927.346.050	Bidang I
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan pascabencana			5	3.433.600.000	5	4.642.423.400	5	5.266.910.000	5	5.823.545.000	5	6.155.101.000	25	25.321.579.400	Bidang III
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota TRC yang mengikuti pelatihan			50	50.000.000	100	112.000.000	100	124.630.000	100	137.090.800	100	150.203.524	450	573.924.324	Bidang II
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)			200	100.000.000	400	206.000.000	400	212.180.000	400	218.545.400	400	225.101.762	1800	961.827.162	Bidang I
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100	1.905.000.000	100	3.375.000.000	100	3.500.000.000	100	3.625.000.000	100	3.625.000.000	100	16.030.000.000	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan darurat kebencanaan			100	1.405.000.000	100	2.725.000.000	100	2.775.000.000	100	2.825.000.000	100	2.825.000.000	100	12.555.000.000	Bidang II
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana			100	300.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.025.000.000	Bidang II
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah paket logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	10	1.450.000.000	Bidang II
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana			100	175.000.000	100	175.000.000	100	245.566.390	100	144.683.382	100	168.773.884	500	909.023.656	

1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah regulasi penanganan kebencanaan tersusun			2	50.000.000	0	0	4	100.000.000	0	0	0	0	6	150.000.000	Bidang I
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana (Relawan)			2	50.000.000	2	75.000.000	2	45.566.390	2	44.683.382	2	68.773.884	10	284.023.656	Bidang I
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan			10	75.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	70	475.000.000	Bidang I

Tabel 6.2
Pelaksanaan dan Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	Urusan Pemerintahan Bidang KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.139.684.000	20.828.242.920	22.212.057.578	23.820.535.605	24.583.303.343	APBD KABUPATEN KEBUMEN	SATPOL PP
							PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	437.410.000	640.231.000	668.838.000	698.003.000	727.744.000		SATPOL PP	
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	180.000.000	185.400.000	190.962.000	196.691.000		SATPOL PP	
							Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	-	180.000.000	185.400.000	190.962.000	196.691.000		SATPOL PP	
							Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	427.410.000	440.231.000	453.438.000	467.041.000	481.053.000		SATPOL PP	
							Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	47.608.000	49.036.000	50.507.000	52.022.000	53.583.000		SATPOL PP	

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
								Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	36.725.000	37.826.000	38.961.000	40.130.000	41.334.000		SATPOL PP
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	343.077.000	353.369.000	363.970.000	374.889.000	386.136.000		SATPOL PP
								Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000		SATPOL PP
								Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000		SATPOL PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.778.752.000	10.018.505.960	10.693.609.789	11.480.516.302	11.844.279.672		BPBD
								Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	512.000.000	424.360.000	437.090.000	550.202.000		BPBD
								Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	100.000.000	-	-	100.000.000		BPBD
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	400.000.000	412.000.000	424.360.000	437.090.000	450.202.000		BPBD

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	5.403.752.000	5.956.505.960	6.494.249.789	7.243.426.302	7.469.077.672		BPBD
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	150.000.000	-	150.000.000	-		BPBD
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		BPBD
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000	360.500.000	371.314.000	382.453.000	393.926.000		BPBD
								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	325.000.000	325.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000		BPBD
								Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		BPBD
								Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	695.152.000	707.005.960	718.945.789	731.792.102	744.745.386		BPBD
								Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.433.600.000	3.971.000.000	4.567.180.000	5.123.545.000	5.455.101.000		BPBD
								Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	112.000.000	124.630.000	137.090.800	150.203.524		BPBD

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.400	225.101.762		BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.800.000.000	3.375.000.000	3.500.000.000	3.625.000.000	3.625.000.000		BPBD
								Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.300.000.000	2.725.000.000	2.775.000.000	2.825.000.000	2.825.000.000		BPBD
								Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	400.000.000	425.000.000	450.000.000	450.000.000		BPBD
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000		BPBD
								Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	175.000.000	175.000.000	275.000.000	175.000.000	200.000.000		BPBD
								Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	-	100.000.000	-	-		BPBD
								Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000		BPBD
								Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		BPBD

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	144.770.000	151.000.000	156.000.000	161.500.000	167.000.000		SATPOL PP
								Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	52.500.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000		SATPOL PP
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.000.000	52.500.000	55.000.000	57.500.000	60.000.000		SATPOL PP
								Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.520.000	40.500.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000		SATPOL PP
								Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.520.000	40.500.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000		SATPOL PP
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	55.250.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000		SATPOL PP
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	55.250.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000		SATPOL PP

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUB-URUSAN BENCANA

7.1. Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di

masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Tujuan dan

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan program unggulan MEN TAMBENG Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, merupakan upaya mendukung pelaksanaan misi Bupati dan wakil Bupati, yaitu Misi ke 5 Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat sebagaimana tabel 7.1 indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Trantibumlinmas (Sub-Urusan Bencana)

No	Urusan	Indikator	Sa tu an	Kondisi Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa tangguh Bencana	%	26,19	100	100	100	100	100	100	100

7.2. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Upaya pencapaian Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan :

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis.
2. perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar.
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Semua Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait.

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indikator kinerja pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Indikator	Rumus	Target (%) /Tahun
I pelayanan informasi rawan bencana				
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100
			Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100
			Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
II Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100
			Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	
2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100
			Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100
			Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	
4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100
			Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	
5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	100
			Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	

	6.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	100
				Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	
3		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	100
				Jumlah seluruh penetapan status KLB	
	2	Respon cepat darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	100
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	
	3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	
	4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	100
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kebumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan daerah. Renstra BPBD Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 untuk terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Kebumen serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Kebumen tahun 2022-2026. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Dengan memperlihatkan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka turut serta bersama sama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketangguhan wilayah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara mandiri dapat terwujud.

Renstra BPBD Kabupaten Kebumen merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat

nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Kebumen, September 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. MUNADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690907 199101 1 001

LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil Penilaian
Ketangguhan Desa se-
Kab. Kebumen Tahun
2020

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN, KABUPATEN	INDEK DESA TANGGUH	TINGKAT KETANGGUHAN DESA
1	Adikarto	Adimulyo, Kebumen	63,55	TANGGUH MADYA
2	Adiluhur	Adimulyo, Kebumen	76,67	TANGGUH MADYA
3	Temanggal	Adimulyo, Kebumen	56,02	TANGGUH PRATAMA
4	Adimulyo	Adimulyo, Kebumen	39,62	TANGGUH PRATAMA
5	Arjomulyo	Adimulyo, Kebumen	35,70	TANGGUH PRATAMA
6	Wajasari	Adimulyo, Kebumen	32,17	TANGGUH PRATAMA
7	Arjosari	Adimulyo, Kebumen	81,94	TANGGUH MADYA
8	Banyuroto	Adimulyo, Kebumen	31,22	TANGGUH PRATAMA
9	Tepakyang	Adimulyo, Kebumen	33,21	TANGGUH PRATAMA
10	Bonjok	Adimulyo, Kebumen	43,68	TANGGUH PRATAMA
11	Candi Wulan	Adimulyo, Kebumen	60,83	TANGGUH MADYA
12	Caruban	Adimulyo, Kebumen	56,38	TANGGUH PRATAMA
13	Joho	Adimulyo, Kebumen	55,93	TANGGUH PRATAMA
14	Kemujan	Adimulyo, Kebumen	45,55	TANGGUH PRATAMA
15	Mangunharjo	Adimulyo, Kebumen	50,04	TANGGUH PRATAMA
16	Meles	Adimulyo, Kebumen	66,92	TANGGUH MADYA
17	Pekuwon	Adimulyo, Kebumen	81,17	TANGGUH MADYA
18	Sekarteja	Adimulyo, Kebumen	66,77	TANGGUH MADYA
19	Sidamukti	Adimulyo, Kebumen	78,40	TANGGUH MADYA
20	Sidamulyo	Adimulyo, Kebumen	41,96	TANGGUH PRATAMA
21	Sugihwaras	Adimulyo, Kebumen	74,71	TANGGUH MADYA
22	Tambakharjo	Adimulyo, Kebumen	46,67	TANGGUH PRATAMA
23	Tegalsari	Adimulyo, Kebumen	36,82	TANGGUH PRATAMA
24	Bojongsari	Alian, Kebumen	49,22	TANGGUH PRATAMA
25	Jatimulyo	Alian, Kebumen	65,38	TANGGUH MADYA
26	Kalijaya	Alian, Kebumen	82,45	TANGGUH MADYA
27	Kaliputih	Alian, Kebumen	41,44	TANGGUH PRATAMA
28	Kalirancang	Alian, Kebumen	57,31	TANGGUH PRATAMA
29	Kambang Sari	Alian, Kebumen	38,82	TANGGUH PRATAMA
30	Karangkembang	Alian, Kebumen	71,34	TANGGUH MADYA
31	Karangtanjung	Alian, Kebumen	57,78	TANGGUH PRATAMA
32	Kemangguhan	Alian, Kebumen	61,53	TANGGUH MADYA
33	Krakal	Alian, Kebumen	58,39	TANGGUH MADYA
34	Sawangan	Alian, Kebumen	41,56	TANGGUH PRATAMA
35	Seliling	Alian, Kebumen	55,78	TANGGUH PRATAMA
36	Surotrunan	Alian, Kebumen	56,68	TANGGUH PRATAMA
37	Tanuharjo	Alian, Kebumen	37,60	TANGGUH PRATAMA
38	Tlogowulung	Alian, Kebumen	46,87	TANGGUH PRATAMA
39	Wonokromo	Alian, Kebumen	61,79	TANGGUH MADYA
40	Ambalkebrek	Ambal, Kebumen	58,67	TANGGUH MADYA
41	Ambalkliwonan	Ambal, Kebumen	26,94	TANGGUH PRATAMA
42	Peneket	Ambal, Kebumen	56,17	TANGGUH PRATAMA
43	Pasarsenen	Ambal, Kebumen	61,67	TANGGUH MADYA

44	Ambalresmi	Ambal, Kebumen	37,99	TANGGUH PRATAMA
45	Ambarwinangun	Ambal, Kebumen	28,40	TANGGUH PRATAMA
46	Plempukankembaran	Ambal, Kebumen	41,01	TANGGUH PRATAMA
47	Sinungreja	Ambal, Kebumen	27,97	TANGGUH PRATAMA
48	Banjarsari	Ambal, Kebumen	54,82	TANGGUH PRATAMA
49	Benerkulon	Ambal, Kebumen	31,09	TANGGUH PRATAMA
50	Prasutan	Ambal, Kebumen	26,37	TANGGUH PRATAMA
51	Benerwetan	Ambal, Kebumen	52,18	TANGGUH PRATAMA
52	Blengorkulon	Ambal, Kebumen	47,54	TANGGUH PRATAMA
53	Pucangan	Ambal, Kebumen	55,92	TANGGUH PRATAMA
54	Blengorwetan	Ambal, Kebumen	57,17	TANGGUH PRATAMA
55	Dukuhrejasari	Ambal, Kebumen	54,18	TANGGUH PRATAMA
56	Sidareja	Ambal, Kebumen	45,91	TANGGUH PRATAMA
57	Entak	Ambal, Kebumen	62,29	TANGGUH MADYA
58	Gondanglegi	Ambal, Kebumen	51,02	TANGGUH PRATAMA
59	Sidoluhur	Ambal, Kebumen	59,25	TANGGUH MADYA
60	Kaibon	Ambal, Kebumen	76,18	TANGGUH MADYA
61	Kaibonpetangkuran	Ambal, Kebumen	63,29	TANGGUH MADYA
62	Sidomukti	Ambal, Kebumen	44,43	TANGGUH PRATAMA
63	Kembangawit	Ambal, Kebumen	29,75	TANGGUH PRATAMA
64	Kenayajayan	Ambal, Kebumen	50,54	TANGGUH PRATAMA
65	Sidomulyo	Ambal, Kebumen	30,22	TANGGUH PRATAMA
66	Kradenan	Ambal, Kebumen	38,47	TANGGUH PRATAMA
67	Lajer	Ambal, Kebumen	37,38	TANGGUH PRATAMA
68	Singosari	Ambal, Kebumen	44,49	TANGGUH PRATAMA
69	Surobayan	Ambal, Kebumen	48,48	TANGGUH PRATAMA
70	Sumberjati	Ambal, Kebumen	41,73	TANGGUH PRATAMA
71	Pagedangan	Ambal, Kebumen	39,75	TANGGUH PRATAMA
72	Argopeni	Ayah, Kebumen	73,75	TANGGUH MADYA
73	Argosari	Ayah, Kebumen	40,27	TANGGUH PRATAMA
74	Ayah	Ayah, Kebumen	61,24	TANGGUH MADYA
75	Banjararjo	Ayah, Kebumen	43,04	TANGGUH PRATAMA
76	Bulurejo	Ayah, Kebumen	33,75	TANGGUH PRATAMA
77	Candirenggo	Ayah, Kebumen	53,65	TANGGUH PRATAMA
78	Demangsari	Ayah, Kebumen	60,44	TANGGUH MADYA
79	Jatijajar	Ayah, Kebumen	32,92	TANGGUH PRATAMA
80	Jitung	Ayah, Kebumen	75,56	TANGGUH MADYA
81	Kalibangkang	Ayah, Kebumen	73,63	TANGGUH MADYA
82	Kalipoh	Ayah, Kebumen	46,32	TANGGUH PRATAMA
83	Karangduwur	Ayah, Kebumen	76,27	TANGGUH MADYA
84	Kedungweru	Ayah, Kebumen	58,82	TANGGUH MADYA
85	Mangunweni	Ayah, Kebumen	68,59	TANGGUH MADYA
86	Pasir	Ayah, Kebumen	64,39	TANGGUH MADYA
87	Srati	Ayah, Kebumen	49,21	TANGGUH PRATAMA
88	Tlogosari	Ayah, Kebumen	42,61	TANGGUH PRATAMA
89	Watukelir	Ayah, Kebumen	51,50	TANGGUH PRATAMA
90	Balorejo	Bonorowo, Kebumen	97,24	TANGGUH UTAMA
91	Bonjokkidul	Bonorowo, Kebumen	68,48	TANGGUH MADYA
92	Bonjoklor	Bonorowo, Kebumen	52,96	TANGGUH PRATAMA

93	Bonorowo	Bonorowo, Kebumen	24,95	TANGGUH PRATAMA
94	Ngasinan	Bonorowo, Kebumen	31,42	TANGGUH PRATAMA
95	Patukrejo	Bonorowo, Kebumen	45,09	TANGGUH PRATAMA
96	Rowosari	Bonorowo, Kebumen	44,50	TANGGUH PRATAMA
97	Tlogorejo	Bonorowo, Kebumen	38,83	TANGGUH PRATAMA
98	Sirnoboyo	Bonorowo, Kebumen	34,53	TANGGUH PRATAMA
99	Pujodadi	Bonorowo, Kebumen	60,90	TANGGUH MADYA
100	Mrentul	Bonorowo, Kebumen	47,40	TANGGUH PRATAMA
101	Adiwarno	Buayan, Kebumen	54,40	TANGGUH PRATAMA
102	Banyumudal	Buayan, Kebumen	54,11	TANGGUH PRATAMA
103	Buayan	Buayan, Kebumen	42,93	TANGGUH PRATAMA
104	Geblog	Buayan, Kebumen	50,93	TANGGUH PRATAMA
105	Jatiroto	Buayan, Kebumen	30,22	TANGGUH PRATAMA
106	Jladri	Buayan, Kebumen	54,43	TANGGUH PRATAMA
107	Jogomulyo	Buayan, Kebumen	27,27	TANGGUH PRATAMA
108	Karangbolong	Buayan, Kebumen	73,42	TANGGUH MADYA
109	Karangsari	Buayan, Kebumen	54,24	TANGGUH PRATAMA
110	Mergosono	Buayan, Kebumen	78,51	TANGGUH MADYA
111	Nogoraji	Buayan, Kebumen	33,57	TANGGUH PRATAMA
112	Pakuran	Buayan, Kebumen	59,20	TANGGUH MADYA
113	Purbowangi	Buayan, Kebumen	52,54	TANGGUH PRATAMA
114	Rangkah	Buayan, Kebumen	65,69	TANGGUH MADYA
115	Rogodadi	Buayan, Kebumen	38,06	TANGGUH PRATAMA
116	Rogodono	Buayan, Kebumen	47,10	TANGGUH PRATAMA
117	Semampir	Buayan, Kebumen	32,27	TANGGUH PRATAMA
118	Sikayu	Buayan, Kebumen	41,17	TANGGUH PRATAMA
119	Tugu	Buayan, Kebumen	56,02	TANGGUH PRATAMA
120	Wonodadi	Buayan, Kebumen	43,34	TANGGUH PRATAMA
121	Ambalkumolo	Buluspesantren, Kebumen	59,36	TANGGUH MADYA
122	Ampih	Buluspesantren, Kebumen	50,86	TANGGUH PRATAMA
123	Waluyo	Buluspesantren, Kebumen	62,75	TANGGUH MADYA
124	Arjowinangun	Buluspesantren, Kebumen	28,13	TANGGUH PRATAMA
125	Ayamputih	Buluspesantren, Kebumen	54,64	TANGGUH PRATAMA
126	Banjurmukadan	Buluspesantren, Kebumen	28,97	TANGGUH PRATAMA
127	Banjurpasar	Buluspesantren, Kebumen	28,97	TANGGUH PRATAMA
128	Bocor	Buluspesantren, Kebumen	58,95	TANGGUH MADYA
129	Brecong	Buluspesantren, Kebumen	77,15	TANGGUH MADYA
130	Buluspesantren	Buluspesantren, Kebumen	68,42	TANGGUH MADYA
131	Indrosari	Buluspesantren, Kebumen	46,45	TANGGUH PRATAMA
132	Jogopaten	Buluspesantren, Kebumen	60,07	TANGGUH MADYA
133	Kloposawit	Buluspesantren, Kebumen	57,34	TANGGUH PRATAMA
134	Maduretno	Buluspesantren, Kebumen	51,73	TANGGUH PRATAMA
135	Rantewringin	Buluspesantren, Kebumen	51,96	TANGGUH PRATAMA
136	Sangubanyu	Buluspesantren, Kebumen	32,51	TANGGUH PRATAMA
137	Setrojenar	Buluspesantren, Kebumen	50,19	TANGGUH PRATAMA
138	Sidomoro	Buluspesantren, Kebumen	35,86	TANGGUH PRATAMA
139	Tambakrejo	Buluspesantren, Kebumen	25,21	TANGGUH PRATAMA
140	Tanjungrejo	Buluspesantren, Kebumen	42,85	TANGGUH PRATAMA
141	Tanjungsari	Buluspesantren, Kebumen	47,00	TANGGUH PRATAMA

142	Kelurahan Gombong	Gombong, Kebumen	70,84	TANGGUH MADYA
143	Kelurahan Wonokriyo	Gombong, Kebumen	81,46	TANGGUH MADYA
144	Semondo	Gombong, Kebumen	41,70	TANGGUH PRATAMA
145	Semanding	Gombong, Kebumen	40,16	TANGGUH PRATAMA
146	Banjarsari	Gombong, Kebumen	31,24	TANGGUH PRATAMA
147	Kalitengah	Gombong, Kebumen	35,41	TANGGUH PRATAMA
148	Kedungpuji	Gombong, Kebumen	65,00	TANGGUH MADYA
149	Kemukus	Gombong, Kebumen	47,16	TANGGUH PRATAMA
150	Klopogodo	Gombong, Kebumen	77,92	TANGGUH MADYA
151	Panjangsari	Gombong, Kebumen	72,81	TANGGUH MADYA
152	Patemon	Gombong, Kebumen	49,67	TANGGUH PRATAMA
153	Sidayu	Gombong, Kebumen	55,25	TANGGUH PRATAMA
154	Wero	Gombong, Kebumen	23,04	TANGGUH PRATAMA
155	Wonosigro	Gombong, Kebumen	45,66	TANGGUH PRATAMA
156	Candi	Karanganyar, Kebumen	36,52	TANGGUH PRATAMA
157	Giripurno	Karanganyar, Kebumen	36,61	TANGGUH PRATAMA
158	Grenggeng	Karanganyar, Kebumen	30,65	TANGGUH PRATAMA
159	Kelurahan Jatiluhur	Karanganyar, Kebumen	33,28	TANGGUH PRATAMA
160	Kelurahan Karanganyar	Karanganyar, Kebumen	38,78	TANGGUH PRATAMA
161	Karangkemiri	Karanganyar, Kebumen	49,22	TANGGUH PRATAMA
162	Kelurahan Panjatan	Karanganyar, Kebumen	55,06	TANGGUH PRATAMA
163	Kelurahan Plarangan	Karanganyar, Kebumen	38,87	TANGGUH PRATAMA
164	Pohkumbang	Karanganyar, Kebumen	27,17	TANGGUH PRATAMA
165	Sidomulyo	Karanganyar, Kebumen	48,91	TANGGUH PRATAMA
166	Wonorejo	Karanganyar, Kebumen	74,17	TANGGUH MADYA
167	Binangun	Karanggayam, Kebumen	68,43	TANGGUH MADYA
168	Clapar	Karanggayam, Kebumen	68,14	TANGGUH MADYA
169	Ginandong	Karanggayam, Kebumen	39,83	TANGGUH PRATAMA
170	Giritirto	Karanggayam, Kebumen	43,24	TANGGUH PRATAMA
171	Glontor	Karanggayam, Kebumen	43,65	TANGGUH PRATAMA
172	Gunungsari	Karanggayam, Kebumen	50,07	TANGGUH PRATAMA
173	Kajoran	Karanggayam, Kebumen	46,44	TANGGUH PRATAMA
174	Kalibening	Karanggayam, Kebumen	28,99	TANGGUH PRATAMA
175	Kalirejo	Karanggayam, Kebumen	50,37	TANGGUH PRATAMA
176	Karanggayam	Karanggayam, Kebumen	40,92	TANGGUH PRATAMA
177	Karangmojo	Karanggayam, Kebumen	54,52	TANGGUH PRATAMA
178	Karangrejo	Karanggayam, Kebumen	44,88	TANGGUH PRATAMA
179	Karangtengah	Karanggayam, Kebumen	32,75	TANGGUH PRATAMA
180	Kebakalan	Karanggayam, Kebumen	42,28	TANGGUH PRATAMA
181	Logandu	Karanggayam, Kebumen	38,35	TANGGUH PRATAMA
182	Pagebangan	Karanggayam, Kebumen	42,19	TANGGUH PRATAMA
183	Penimbun	Karanggayam, Kebumen	43,91	TANGGUH PRATAMA
184	Selogiri	Karanggayam, Kebumen	42,01	TANGGUH PRATAMA
185	Wonotirto	Karanggayam, Kebumen	40,03	TANGGUH PRATAMA
186	Banioro	Karangsambung, Kebumen	52,06	TANGGUH PRATAMA

187	Kaligending	Karangsambung, Kebumen	55,51	TANGGUH PRATAMA
188	Kalisana	Karangsambung, Kebumen	32,46	TANGGUH PRATAMA
189	Karangsambung	Karangsambung, Kebumen	60,75	TANGGUH MADYA
190	Kedungwaru	Karangsambung, Kebumen	44,04	TANGGUH PRATAMA
191	Langse	Karangsambung, Kebumen	35,37	TANGGUH PRATAMA
192	Pencil	Karangsambung, Kebumen	30,26	TANGGUH PRATAMA
193	Plumbon	Karangsambung, Kebumen	55,16	TANGGUH PRATAMA
194	Pujotirto	Karangsambung, Kebumen	49,53	TANGGUH PRATAMA
195	Seling	Karangsambung, Kebumen	42,44	TANGGUH PRATAMA
196	Tlepok	Karangsambung, Kebumen	64,77	TANGGUH MADYA
197	Totogan	Karangsambung, Kebumen	59,40	TANGGUH MADYA
198	Wadasmalang	Karangsambung, Kebumen	40,38	TANGGUH PRATAMA
199	Widoro	Karangsambung, Kebumen	41,45	TANGGUH PRATAMA
200	Kelurahan Kebumen	Kebumen, Kebumen	49,38	TANGGUH PRATAMA
201	Kelurahan Panjer	Kebumen, Kebumen	37,57	TANGGUH PRATAMA
202	Kelurahan Tamanwinangun	Kebumen, Kebumen	74,15	TANGGUH MADYA
203	Kelurahan Selang	Kebumen, Kebumen	28,21	TANGGUH PRATAMA
204	Kembaran	Kebumen, Kebumen	30,69	TANGGUH PRATAMA
205	Kelurahan Bumirejo	Kebumen, Kebumen	63,26	TANGGUH MADYA
206	Adikarso	Kebumen, Kebumen	50,79	TANGGUH PRATAMA
207	Argopeni	Kebumen, Kebumen	36,21	TANGGUH PRATAMA
208	Bandung	Kebumen, Kebumen	30,94	TANGGUH PRATAMA
209	Candimulyo	Kebumen, Kebumen	35,73	TANGGUH PRATAMA
210	Candiwulan	Kebumen, Kebumen	53,91	TANGGUH PRATAMA
211	Depokrejo	Kebumen, Kebumen	45,28	TANGGUH PRATAMA
212	Gemeksekti	Kebumen, Kebumen	28,95	TANGGUH PRATAMA
213	Gesikan	Kebumen, Kebumen	27,48	TANGGUH PRATAMA
214	Jatisari	Kebumen, Kebumen	31,20	TANGGUH PRATAMA
215	Jemur	Kebumen, Kebumen	61,14	TANGGUH MADYA
216	Kalibagor	Kebumen, Kebumen	26,73	TANGGUH PRATAMA
217	Kalijirek	Kebumen, Kebumen	33,21	TANGGUH PRATAMA
218	Kalirejo	Kebumen, Kebumen	55,96	TANGGUH PRATAMA
219	Karangsari	Kebumen, Kebumen	55,51	TANGGUH PRATAMA
220	Kawedusan	Kebumen, Kebumen	38,22	TANGGUH PRATAMA
221	Kutosari	Kebumen, Kebumen	57,57	TANGGUH PRATAMA
222	Mengkowo	Kebumen, Kebumen	28,25	TANGGUH PRATAMA
223	Muktirejo	Kebumen, Kebumen	31,52	TANGGUH PRATAMA

224	Muktisari	Kebumen, Kebumen	60,02	TANGGUH MADYA
225	Roworejo	Kebumen, Kebumen	33,52	TANGGUH PRATAMA
226	Sumberadi	Kebumen, Kebumen	63,39	TANGGUH MADYA
227	Tanahsari	Kebumen, Kebumen	33,19	TANGGUH PRATAMA
228	Wonosari	Kebumen, Kebumen	50,72	TANGGUH PRATAMA
229	Bumiharjo	Klirong, Kebumen	74,82	TANGGUH MADYA
230	Dorowati	Klirong, Kebumen	35,76	TANGGUH PRATAMA
231	Gadungrejo	Klirong, Kebumen	30,47	TANGGUH PRATAMA
232	Gebangsari	Klirong, Kebumen	32,39	TANGGUH PRATAMA
233	Jatimalang	Klirong, Kebumen	45,17	TANGGUH PRATAMA
234	Jerukagung	Klirong, Kebumen	50,79	TANGGUH PRATAMA
235	Jogosimo	Klirong, Kebumen	54,49	TANGGUH PRATAMA
236	Kaliwungu	Klirong, Kebumen	31,25	TANGGUH PRATAMA
237	Karangglonggong	Klirong, Kebumen	41,66	TANGGUH PRATAMA
238	Kebadongan	Klirong, Kebumen	45,81	TANGGUH PRATAMA
239	Kedungsari	Klirong, Kebumen	45,51	TANGGUH PRATAMA
240	Kedungwinangun	Klirong, Kebumen	35,87	TANGGUH PRATAMA
241	Klegenrejo	Klirong, Kebumen	44,64	TANGGUH PRATAMA
242	Klegenwonosari	Klirong, Kebumen	30,67	TANGGUH PRATAMA
243	Klirong	Klirong, Kebumen	31,25	TANGGUH PRATAMA
244	Pandanlor	Klirong, Kebumen	50,13	TANGGUH PRATAMA
245	Podoluhur	Klirong, Kebumen	28,82	TANGGUH PRATAMA
246	Ranterejo	Klirong, Kebumen	32,57	TANGGUH PRATAMA
247	Sitirejo	Klirong, Kebumen	32,22	TANGGUH PRATAMA
248	Tambakagung	Klirong, Kebumen	33,73	TANGGUH PRATAMA
249	Tambakprogaten	Klirong, Kebumen	34,90	TANGGUH PRATAMA
250	Tanggulangin	Klirong, Kebumen	77,41	TANGGUH MADYA
251	Wotbuwono	Klirong, Kebumen	36,53	TANGGUH PRATAMA
252	Bendogarap	Klirong, Kebumen	39,75	TANGGUH PRATAMA
253	Babadsari	Kutowinangun, Kebumen	39,83	TANGGUH PRATAMA
254	Jlegiwinangun	Kutowinangun, Kebumen	31,16	TANGGUH PRATAMA
255	Kaliputih	Kutowinangun, Kebumen	32,85	TANGGUH PRATAMA
256	Karangsari	Kutowinangun, Kebumen	31,39	TANGGUH PRATAMA
257	Korowelang	Kutowinangun, Kebumen	39,46	TANGGUH PRATAMA
258	Kutowinangun	Kutowinangun, Kebumen	36,36	TANGGUH PRATAMA
259	Kuwarisan	Kutowinangun, Kebumen	65,30	TANGGUH MADYA
260	Lumbu	Kutowinangun, Kebumen	41,57	TANGGUH PRATAMA
261	Lundong	Kutowinangun, Kebumen	36,60	TANGGUH PRATAMA
262	Mekarsari	Kutowinangun, Kebumen	43,95	TANGGUH PRATAMA
263	Mrinen	Kutowinangun, Kebumen	39,83	TANGGUH PRATAMA
264	Pejagatan	Kutowinangun, Kebumen	42,28	TANGGUH PRATAMA
265	Pekunden	Kutowinangun, Kebumen	63,86	TANGGUH MADYA
266	Pesalakan	Kutowinangun, Kebumen	44,22	TANGGUH PRATAMA
267	Tanjungmeru	Kutowinangun, Kebumen	55,11	TANGGUH PRATAMA
268	Tanjungsari	Kutowinangun, Kebumen	73,96	TANGGUH MADYA
269	Tanjungseto	Kutowinangun, Kebumen	45,31	TANGGUH PRATAMA
270	Triwarno	Kutowinangun, Kebumen	59,80	TANGGUH MADYA
271	Ungaran	Kutowinangun, Kebumen	27,45	TANGGUH PRATAMA
272	Banjareja	Kuwarasan, Kebumen	62,36	TANGGUH MADYA
273	Bendungan	Kuwarasan, Kebumen	64,93	TANGGUH MADYA

274	Gandusari	Kuwarasan, Kebumen	48,01	TANGGUH PRATAMA
275	Gumawang	Kuwarasan, Kebumen	45,71	TANGGUH PRATAMA
276	Gunungmujil	Kuwarasan, Kebumen	66,86	TANGGUH MADYA
277	Harjodowo	Kuwarasan, Kebumen	21,63	TANGGUH PRATAMA
278	Jatimulya	Kuwarasan, Kebumen	35,77	TANGGUH PRATAMA
279	Kalipurwo	Kuwarasan, Kebumen	36,29	TANGGUH PRATAMA
280	Kamulyan	Kuwarasan, Kebumen	53,63	TANGGUH PRATAMA
281	Kuwarasan	Kuwarasan, Kebumen	32,72	TANGGUH PRATAMA
282	Kuwaru	Kuwarasan, Kebumen	75,44	TANGGUH MADYA
283	Lemahduwur	Kuwarasan, Kebumen	81,80	TANGGUH MADYA
284	Madureso	Kuwarasan, Kebumen	39,75	TANGGUH PRATAMA
285	Mangli	Kuwarasan, Kebumen	41,06	TANGGUH PRATAMA
286	Ori	Kuwarasan, Kebumen	30,62	TANGGUH PRATAMA
287	Pondokgebangsari	Kuwarasan, Kebumen	40,22	TANGGUH PRATAMA
288	Purwodadi	Kuwarasan, Kebumen	86,03	TANGGUH UTAMA
289	Sawangan	Kuwarasan, Kebumen	78,00	TANGGUH MADYA
290	Serut	Kuwarasan, Kebumen	60,63	TANGGUH MADYA
291	Sidomukti	Kuwarasan, Kebumen	64,82	TANGGUH MADYA
292	Tambaksari	Kuwarasan, Kebumen	46,38	TANGGUH PRATAMA
293	Wonoyoso	Kuwarasan, Kebumen	71,22	TANGGUH MADYA
294	Karanggede	Mirit, Kebumen	45,77	TANGGUH PRATAMA
295	Kertodeso	Mirit, Kebumen	45,27	TANGGUH PRATAMA
296	Krubungan	Mirit, Kebumen	45,77	TANGGUH PRATAMA
297	Lembupurwo	Mirit, Kebumen	43,10	TANGGUH PRATAMA
298	Mangunranan	Mirit, Kebumen	43,60	TANGGUH PRATAMA
299	Mirit	Mirit, Kebumen	68,21	TANGGUH MADYA
300	Miritpetikusan	Mirit, Kebumen	64,06	TANGGUH MADYA
301	Ngabeyan	Mirit, Kebumen	32,39	TANGGUH PRATAMA
302	Patukgawemulyo	Mirit, Kebumen	35,31	TANGGUH PRATAMA
303	Patukrejomulyo	Mirit, Kebumen	35,31	TANGGUH PRATAMA
304	Pekutan	Mirit, Kebumen	46,21	TANGGUH PRATAMA
305	Rowo	Mirit, Kebumen	51,73	TANGGUH PRATAMA
306	Sarwogadung	Mirit, Kebumen	30,68	TANGGUH PRATAMA
307	Selotumpeng	Mirit, Kebumen	56,22	TANGGUH PRATAMA
308	Singoyudan	Mirit, Kebumen	48,06	TANGGUH PRATAMA
309	Sitibentar	Mirit, Kebumen	37,51	TANGGUH PRATAMA
310	Tlogodepok	Mirit, Kebumen	55,32	TANGGUH PRATAMA
311	Tlogopragoto	Mirit, Kebumen	50,54	TANGGUH PRATAMA
312	Wergonayan	Mirit, Kebumen	46,73	TANGGUH PRATAMA
313	Winong	Mirit, Kebumen	31,96	TANGGUH PRATAMA
314	Wirogaten	Mirit, Kebumen	47,65	TANGGUH PRATAMA
315	Wiromartan	Mirit, Kebumen	71,72	TANGGUH MADYA
316	Balingasal	Padureso, Kebumen	63,72	TANGGUH MADYA
317	Kaligubuk	Padureso, Kebumen	70,79	TANGGUH MADYA
318	Kalijering	Padureso, Kebumen	33,01	TANGGUH PRATAMA
319	Merden	Padureso, Kebumen	33,01	TANGGUH PRATAMA
320	Padureso	Padureso, Kebumen	62,68	TANGGUH MADYA
321	Pejengkolan	Padureso, Kebumen	33,21	TANGGUH PRATAMA
322	Rahayu	Padureso, Kebumen	69,82	TANGGUH MADYA
323	Sendangdalem	Padureso, Kebumen	31,81	TANGGUH PRATAMA

324	Sidototo	Padureso, Kebumen	42,82	TANGGUH PRATAMA
325	Aditirto	Pejagoan, Kebumen	41,77	TANGGUH PRATAMA
326	Jemur	Pejagoan, Kebumen	39,90	TANGGUH PRATAMA
327	Karangpoh	Pejagoan, Kebumen	70,73	TANGGUH MADYA
328	Kebagoran	Pejagoan, Kebumen	29,93	TANGGUH PRATAMA
329	Kebulusan	Pejagoan, Kebumen	30,78	TANGGUH PRATAMA
330	Kedawung	Pejagoan, Kebumen	43,16	TANGGUH PRATAMA
331	Kuwayuhan	Pejagoan, Kebumen	43,87	TANGGUH PRATAMA
332	Logede	Pejagoan, Kebumen	43,84	TANGGUH PRATAMA
333	Pejagoan	Pejagoan, Kebumen	42,04	TANGGUH PRATAMA
334	Pengaringan	Pejagoan, Kebumen	67,63	TANGGUH MADYA
335	Peniron	Pejagoan, Kebumen	68,68	TANGGUH MADYA
336	Prigi	Pejagoan, Kebumen	46,20	TANGGUH PRATAMA
337	Watulawang	Pejagoan, Kebumen	46,20	TANGGUH PRATAMA
338	Ampelsari	Petanahan, Kebumen	44,28	TANGGUH PRATAMA
339	Banjarwinangun	Petanahan, Kebumen	29,83	TANGGUH PRATAMA
340	Tresnorejo	Petanahan, Kebumen	79,35	TANGGUH MADYA
341	Grogolbeningsari	Petanahan, Kebumen	57,68	TANGGUH PRATAMA
342	Grogolpenatus	Petanahan, Kebumen	41,66	TANGGUH PRATAMA
343	Grujugan	Petanahan, Kebumen	49,74	TANGGUH PRATAMA
344	Jagamertan	Petanahan, Kebumen	47,90	TANGGUH PRATAMA
345	Jatimulyo	Petanahan, Kebumen	30,49	TANGGUH PRATAMA
346	Karangduwur	Petanahan, Kebumen	51,23	TANGGUH PRATAMA
347	Karanggadung	Petanahan, Kebumen	80,07	TANGGUH MADYA
348	Karangreja	Petanahan, Kebumen	85,05	TANGGUH UTAMA
349	Kebonsari	Petanahan, Kebumen	33,37	TANGGUH PRATAMA
350	Kritig	Petanahan, Kebumen	52,84	TANGGUH PRATAMA
351	Kuwangunan	Petanahan, Kebumen	39,25	TANGGUH PRATAMA
352	Munggu	Petanahan, Kebumen	55,32	TANGGUH PRATAMA
353	Nampudadi	Petanahan, Kebumen	28,47	TANGGUH PRATAMA
354	Petanahan	Petanahan, Kebumen	37,04	TANGGUH PRATAMA
355	Podourip	Petanahan, Kebumen	43,42	TANGGUH PRATAMA
356	Sidomulyo	Petanahan, Kebumen	33,80	TANGGUH PRATAMA
357	Tanjungsari	Petanahan, Kebumen	47,43	TANGGUH PRATAMA
358	Tegalretno	Petanahan, Kebumen	42,22	TANGGUH PRATAMA
359	Blater	Poncowarno, Kebumen	71,10	TANGGUH MADYA
360	Jatipurus	Poncowarno, Kebumen	29,51	TANGGUH PRATAMA
361	Jembangan	Poncowarno, Kebumen	51,99	TANGGUH PRATAMA
362	Karangtengah	Poncowarno, Kebumen	38,71	TANGGUH PRATAMA
363	Kebapangan	Poncowarno, Kebumen	37,53	TANGGUH PRATAMA
364	Kedungdowo	Poncowarno, Kebumen	51,99	TANGGUH PRATAMA
365	Lerepkebumen	Poncowarno, Kebumen	62,64	TANGGUH MADYA
366	Poncowarno	Poncowarno, Kebumen	70,03	TANGGUH MADYA
367	Soka	Poncowarno, Kebumen	61,72	TANGGUH MADYA
368	Tegalrejo	Poncowarno, Kebumen	44,77	TANGGUH PRATAMA
369	Tirtomoyo	Poncowarno, Kebumen	39,39	TANGGUH PRATAMA
370	Arjowinangun	Puring, Kebumen	54,94	TANGGUH PRATAMA
371	Banjarejo	Puring, Kebumen	33,61	TANGGUH PRATAMA
372	Bumirejo	Puring, Kebumen	57,76	TANGGUH PRATAMA
373	Kaleng	Puring, Kebumen	33,02	TANGGUH PRATAMA

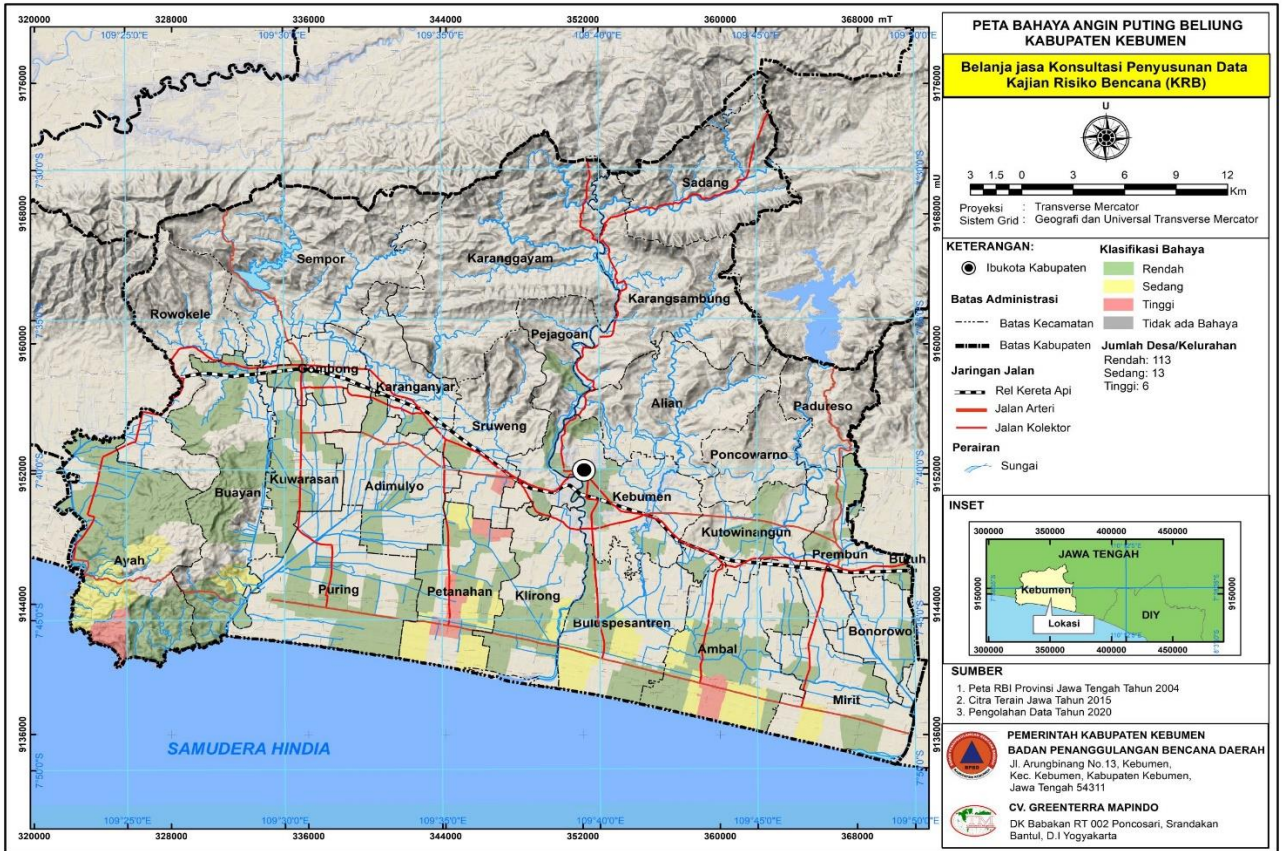
374	Kedalemankulon	Puring, Kebumen	40,95	TANGGUH PRATAMA
375	Kedalemanwetan	Puring, Kebumen	36,25	TANGGUH PRATAMA
376	Krandegan	Puring, Kebumen	34,79	TANGGUH PRATAMA
377	Madurejo	Puring, Kebumen	62,83	TANGGUH MADYA
378	Pasuruhan	Puring, Kebumen	60,82	TANGGUH MADYA
379	Puliharjo	Puring, Kebumen	33,02	TANGGUH PRATAMA
380	Purwoharjo	Puring, Kebumen	44,41	TANGGUH PRATAMA
381	Purwosari	Puring, Kebumen	37,50	TANGGUH PRATAMA
382	Sidobunder	Puring, Kebumen	57,65	TANGGUH PRATAMA
383	Sidodadi	Puring, Kebumen	30,64	TANGGUH PRATAMA
384	Sidoharjo	Puring, Kebumen	69,30	TANGGUH MADYA
385	Sitiadi	Puring, Kebumen	31,30	TANGGUH PRATAMA
386	Srusuhjuritengah	Puring, Kebumen	45,15	TANGGUH PRATAMA
387	Surorejan	Puring, Kebumen	36,07	TANGGUH PRATAMA
388	Tambakmulyo	Puring, Kebumen	49,51	TANGGUH PRATAMA
389	Tukinggedong	Puring, Kebumen	39,74	TANGGUH PRATAMA
390	Waluyorejo	Puring, Kebumen	58,15	TANGGUH PRATAMA
391	Wetonkulon	Puring, Kebumen	41,06	TANGGUH PRATAMA
392	Wetonwetan	Puring, Kebumen	63,99	TANGGUH MADYA
393	Bumiagung	Rowokele, Kebumen	48,72	TANGGUH PRATAMA
394	Giyanti	Rowokele, Kebumen	63,59	TANGGUH MADYA
395	Jatiluhur	Rowokele, Kebumen	42,77	TANGGUH PRATAMA
396	Kalisari	Rowokele, Kebumen	38,28	TANGGUH PRATAMA
397	Kretek	Rowokele, Kebumen	48,52	TANGGUH PRATAMA
398	Pringtutul	Rowokele, Kebumen	50,32	TANGGUH PRATAMA
399	Redisari	Rowokele, Kebumen	56,26	TANGGUH PRATAMA
400	Rowokele	Rowokele, Kebumen	40,13	TANGGUH PRATAMA
401	Sukomulyo	Rowokele, Kebumen	36,18	TANGGUH PRATAMA
402	Wagirpandan	Rowokele, Kebumen	27,31	TANGGUH PRATAMA
403	Wonoharjo	Rowokele, Kebumen	44,32	TANGGUH PRATAMA
404	Cangkring	Sadang, Kebumen	49,02	TANGGUH PRATAMA
405	Kedunggong	Sadang, Kebumen	45,19	TANGGUH PRATAMA
406	Pucangan	Sadang, Kebumen	31,94	TANGGUH PRATAMA
407	Sadangkulon	Sadang, Kebumen	43,74	TANGGUH PRATAMA
408	Sadangwetan	Sadang, Kebumen	42,83	TANGGUH PRATAMA
409	Seboro	Sadang, Kebumen	69,66	TANGGUH MADYA
410	Wonosari	Sadang, Kebumen	31,89	TANGGUH PRATAMA
411	Bejiruyung	Sempor, Kebumen	32,12	TANGGUH PRATAMA
412	Bonosari	Sempor, Kebumen	43,45	TANGGUH PRATAMA
413	Donorojo	Sempor, Kebumen	33,37	TANGGUH PRATAMA
414	Jatinegoro	Sempor, Kebumen	32,41	TANGGUH PRATAMA
415	Kalibeji	Sempor, Kebumen	49,59	TANGGUH PRATAMA
416	Kedungjati	Sempor, Kebumen	66,45	TANGGUH MADYA
417	Kedungwringin	Sempor, Kebumen	31,51	TANGGUH PRATAMA
418	Kenteng	Sempor, Kebumen	64,61	TANGGUH MADYA
419	Pekuncen	Sempor, Kebumen	69,16	TANGGUH MADYA
420	Sampang	Sempor, Kebumen	73,00	TANGGUH MADYA
421	Selokerto	Sempor, Kebumen	43,54	TANGGUH PRATAMA
422	Semali	Sempor, Kebumen	45,21	TANGGUH PRATAMA
423	Sempor	Sempor, Kebumen	29,17	TANGGUH PRATAMA

424	Sidoharum	Sempor, Kebumen	41,07	TANGGUH PRATAMA
425	Somagede	Sempor, Kebumen	59,66	TANGGUH MADYA
426	Tunjungseto	Sempor, Kebumen	43,95	TANGGUH PRATAMA
427	Condongcampur	Sruweng, Kebumen	70,18	TANGGUH MADYA
428	Donosari	Sruweng, Kebumen	64,85	TANGGUH MADYA
429	Giwangretno	Sruweng, Kebumen	58,03	TANGGUH PRATAMA
430	Jabres	Sruweng, Kebumen	38,48	TANGGUH PRATAMA
431	Karanggedang	Sruweng, Kebumen	47,38	TANGGUH PRATAMA
432	Karangjambu	Sruweng, Kebumen	60,41	TANGGUH MADYA
433	Karangpule	Sruweng, Kebumen	63,82	TANGGUH MADYA
434	Karangsari	Sruweng, Kebumen	47,11	TANGGUH PRATAMA
435	Kejawang	Sruweng, Kebumen	27,50	TANGGUH PRATAMA
436	Klepusanggar	Sruweng, Kebumen	28,61	TANGGUH PRATAMA
437	Menganti	Sruweng, Kebumen	30,00	TANGGUH PRATAMA
438	Pakuran	Sruweng, Kebumen	52,25	TANGGUH PRATAMA
439	Pandansari	Sruweng, Kebumen	33,32	TANGGUH PRATAMA
440	Pengempon	Sruweng, Kebumen	28,47	TANGGUH PRATAMA
441	Penusupan	Sruweng, Kebumen	51,51	TANGGUH PRATAMA
442	Purwodeso	Sruweng, Kebumen	45,60	TANGGUH PRATAMA
443	Sidoagung	Sruweng, Kebumen	37,98	TANGGUH PRATAMA
444	Sidoharjo	Sruweng, Kebumen	42,72	TANGGUH PRATAMA
445	Sruweng	Sruweng, Kebumen	43,77	TANGGUH PRATAMA
446	Tanggeran	Sruweng, Kebumen	31,99	TANGGUH PRATAMA
447	Trikarso	Sruweng, Kebumen	51,41	TANGGUH PRATAMA
448	Bagung	Prembun, Kebumen	29,53	TANGGUH PRATAMA
449	Kabekelan	Prembun, Kebumen	73,18	TANGGUH MADYA
450	Kabuaran	Prembun, Kebumen	66,49	TANGGUH MADYA
451	Kedungbulus	Prembun, Kebumen	46,47	TANGGUH PRATAMA
452	Kedungwaru	Prembun, Kebumen	73,09	TANGGUH MADYA
453	Mulyosri	Prembun, Kebumen	27,83	TANGGUH PRATAMA
454	Pecarikan	Prembun, Kebumen	51,29	TANGGUH PRATAMA
455	Pesuningan	Prembun, Kebumen	52,03	TANGGUH PRATAMA
456	Prembun	Prembun, Kebumen	59,67	TANGGUH MADYA
457	Sembirkadipaten	Prembun, Kebumen	63,87	TANGGUH MADYA
458	Sidogede	Prembun, Kebumen	35,73	TANGGUH PRATAMA
459	Tersobo	Prembun, Kebumen	32,66	TANGGUH PRATAMA
460	Tunggalroso	Prembun, Kebumen	66,49	TANGGUH MADYA

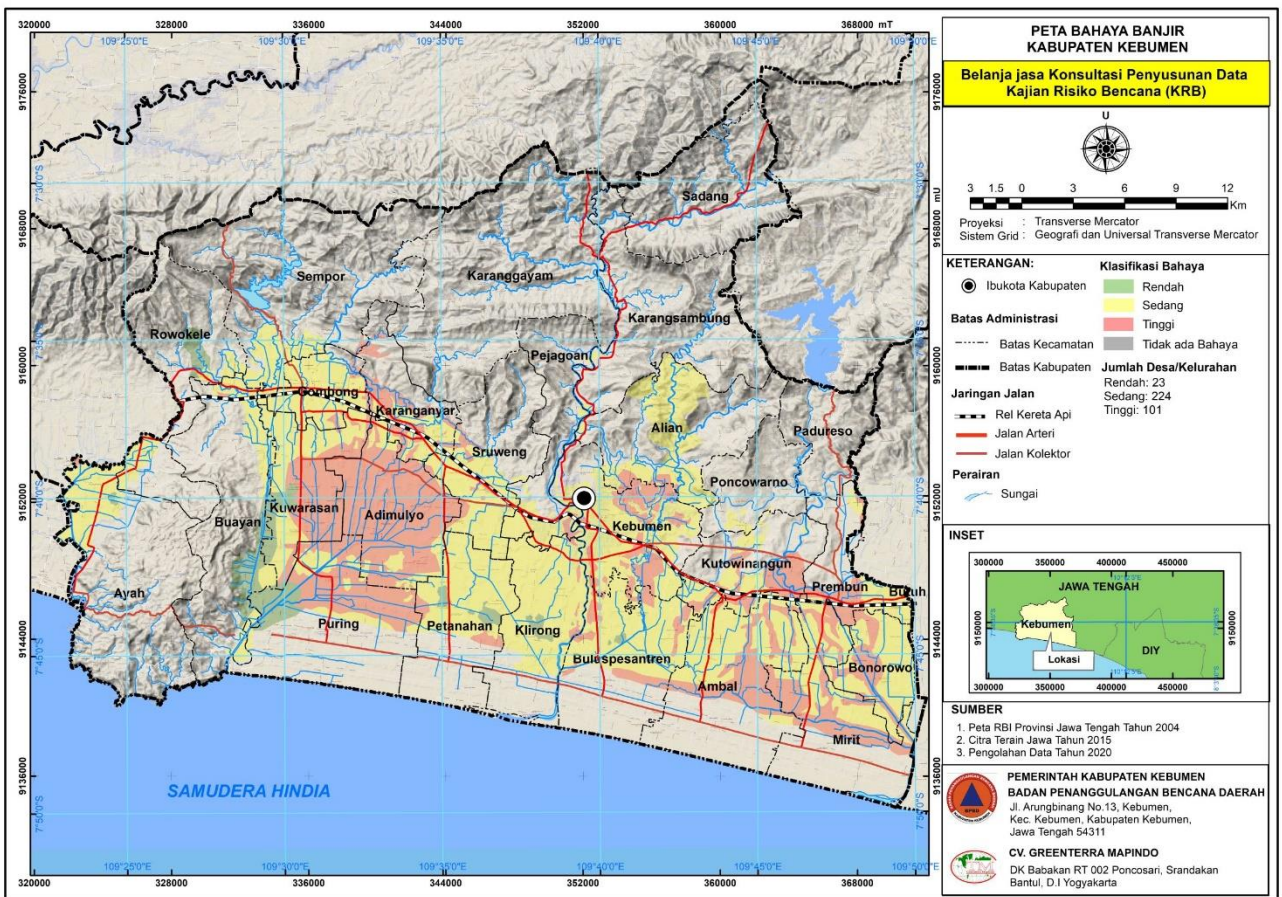
**PETA BAHAYA BENCANA MULTI HAZARD
KRB KAB. KEBUMEN 2020**

- 4. Peta Bahaya Angin Puting Beliung**
- 5. Peta Bahaya Banjir**
- 6. Peta Bahaya Banjir Bandang**
- 7. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi**
- 8. Peta Bahaya Gempa Bumi**
- 9. Peta bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan**
- 10. Peta Bahaya Kekeringan**
- 11. Peta Bahaya Tsunami**
- 12. Peta Bahaya Longsor**

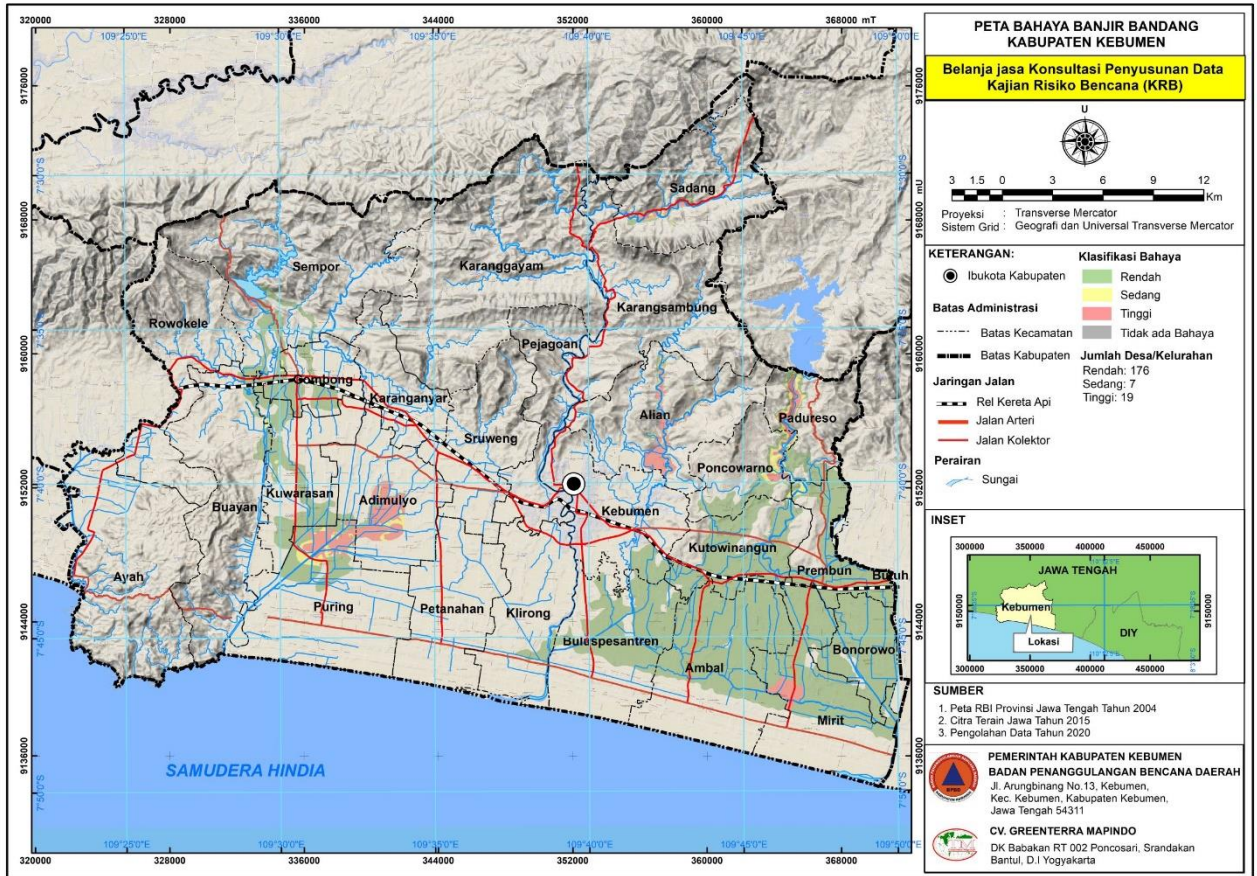
1. Peta Bahaya Angin Puting Beliung



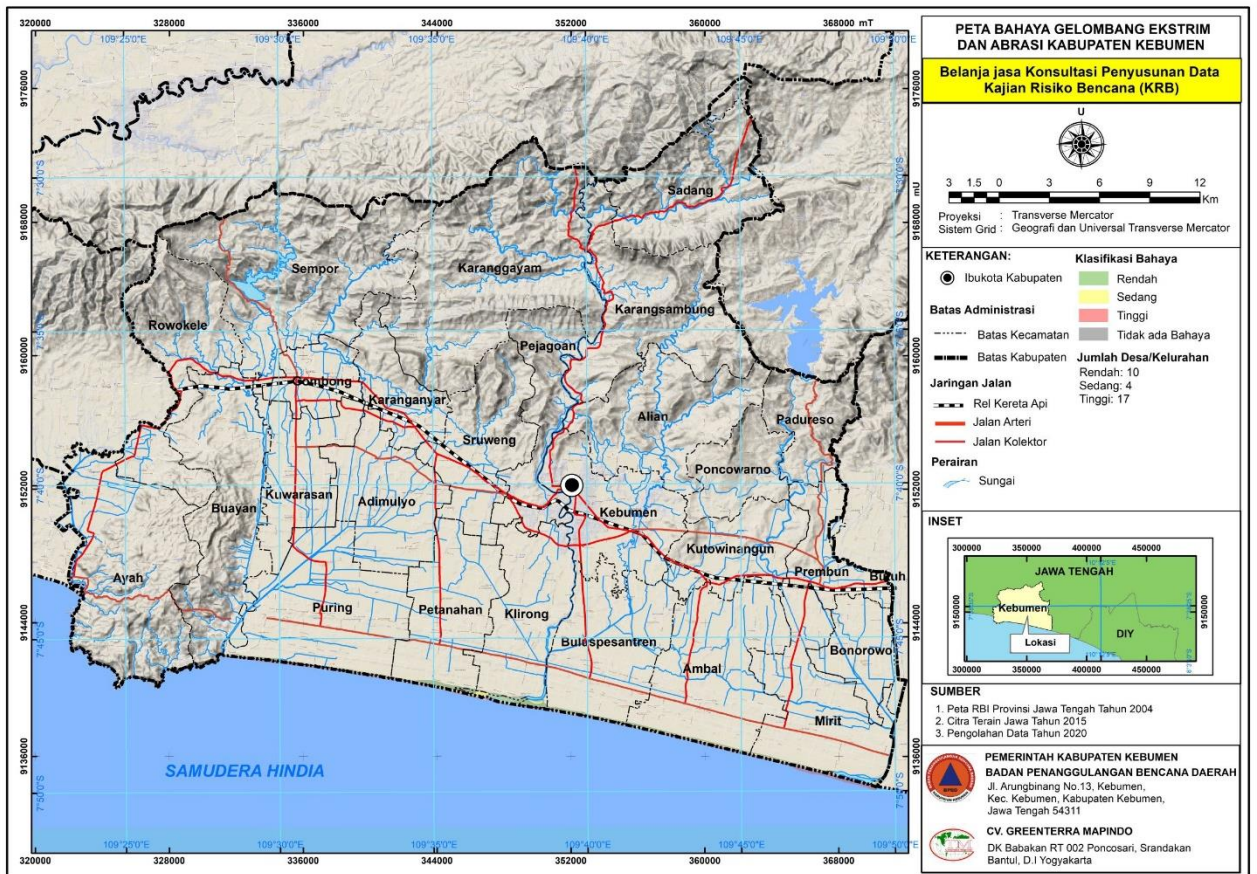
2. Peta Bahaya Banjir



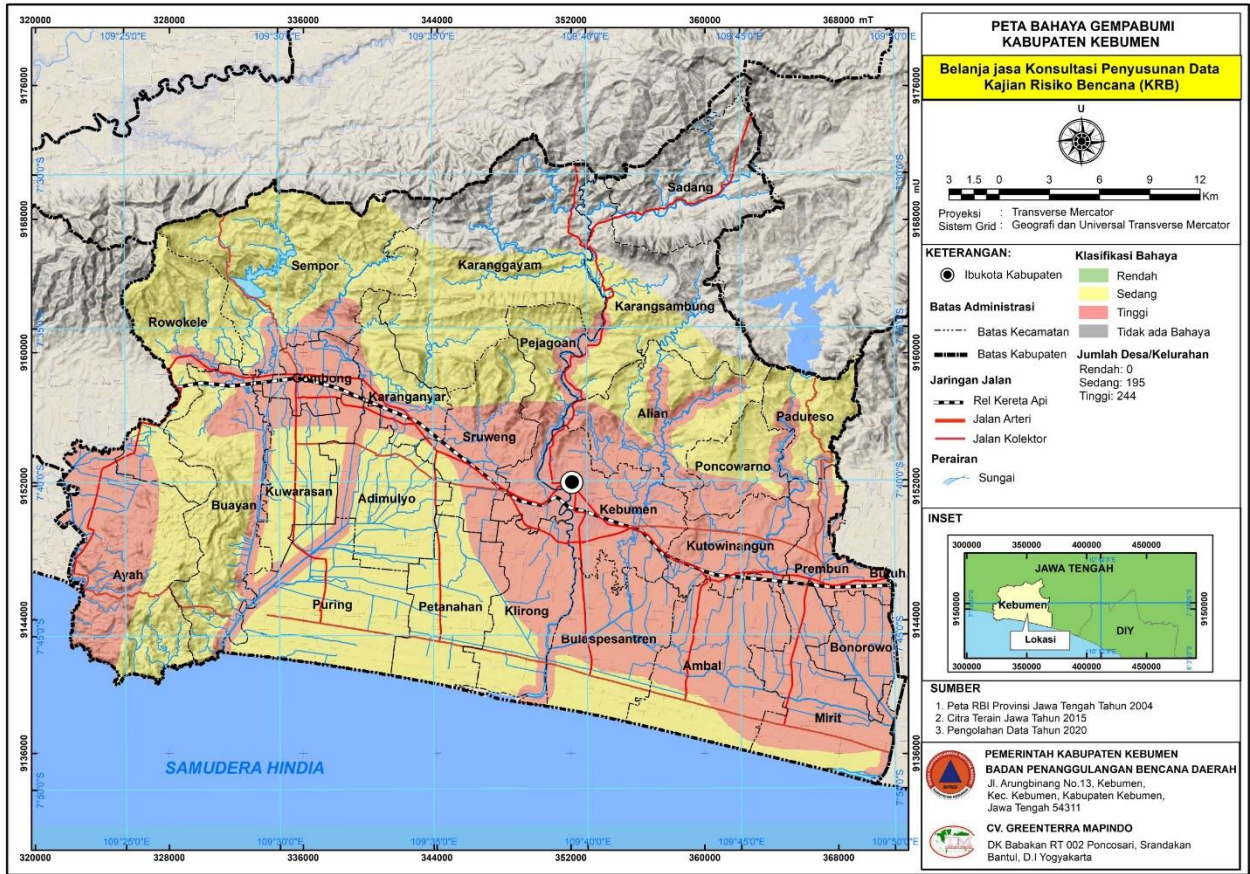
3. Peta Bahaya Banjir Bandang



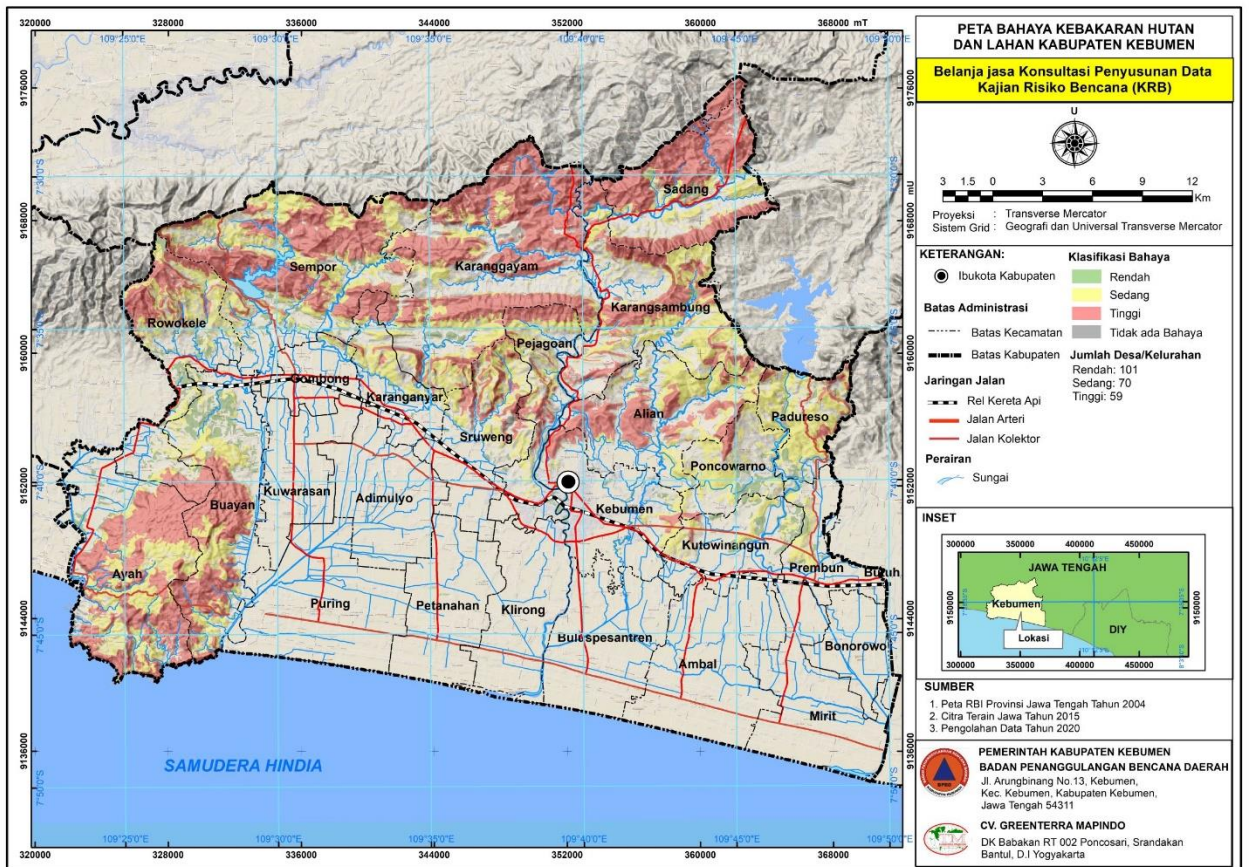
4. Peta Bahaya Gelombang Tinggi dan Abrasi



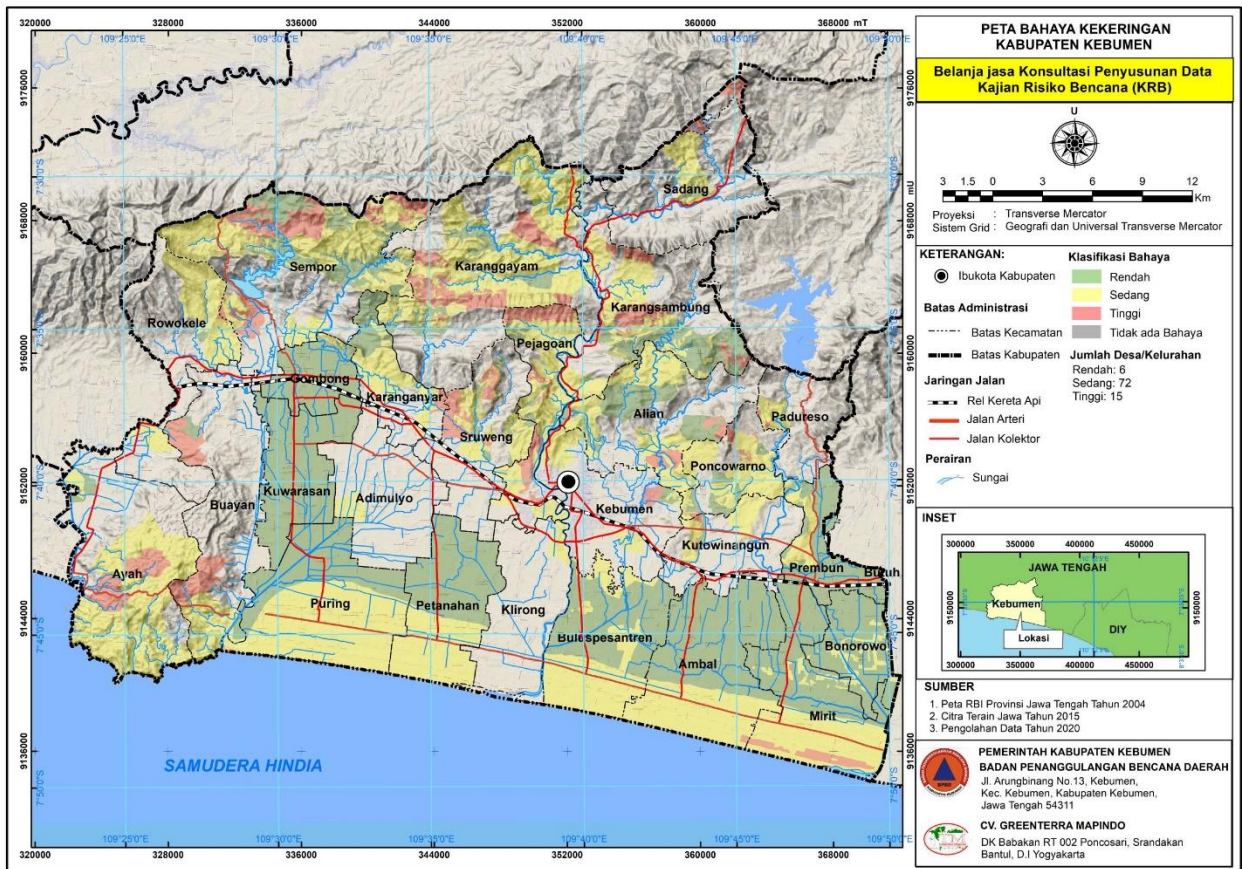
5. Peta Bahaya Gempa Bumi



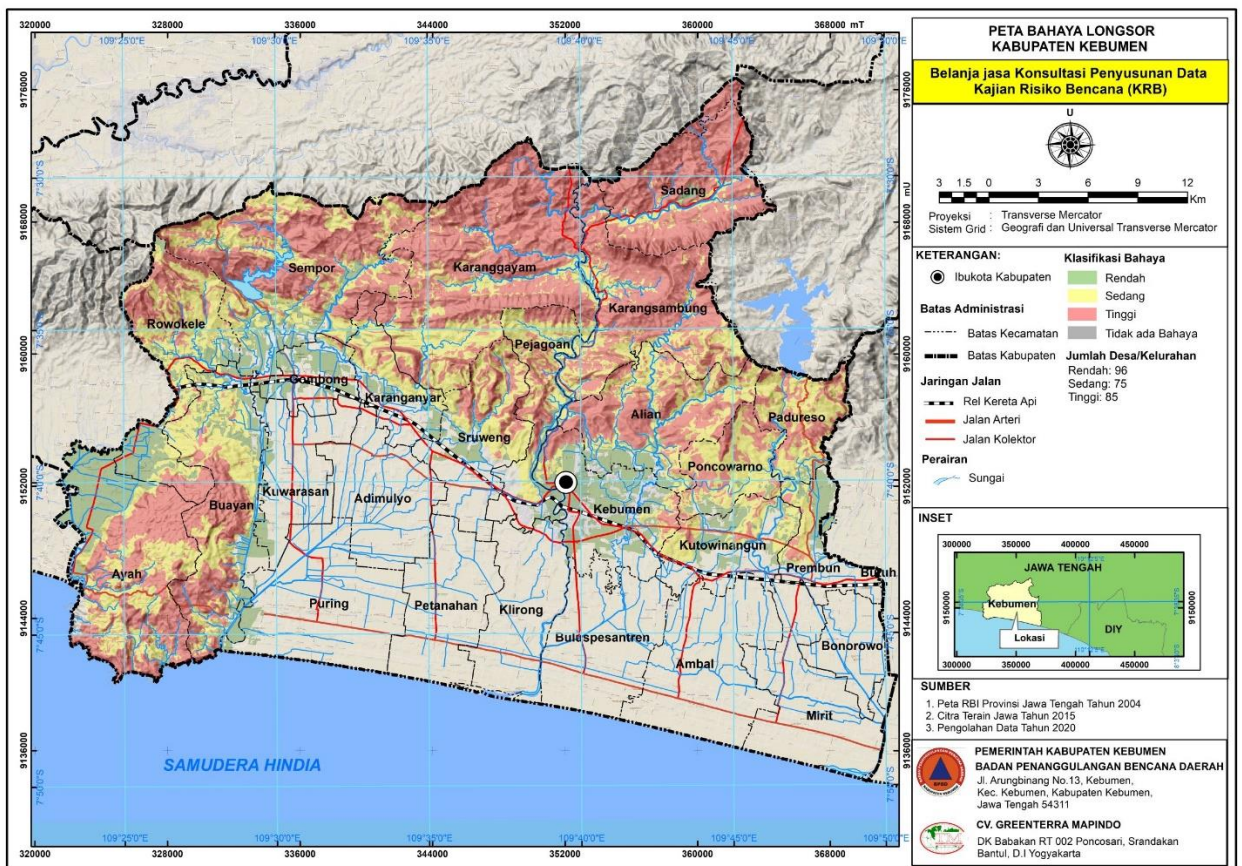
6. Peta Bahaya Karhutla



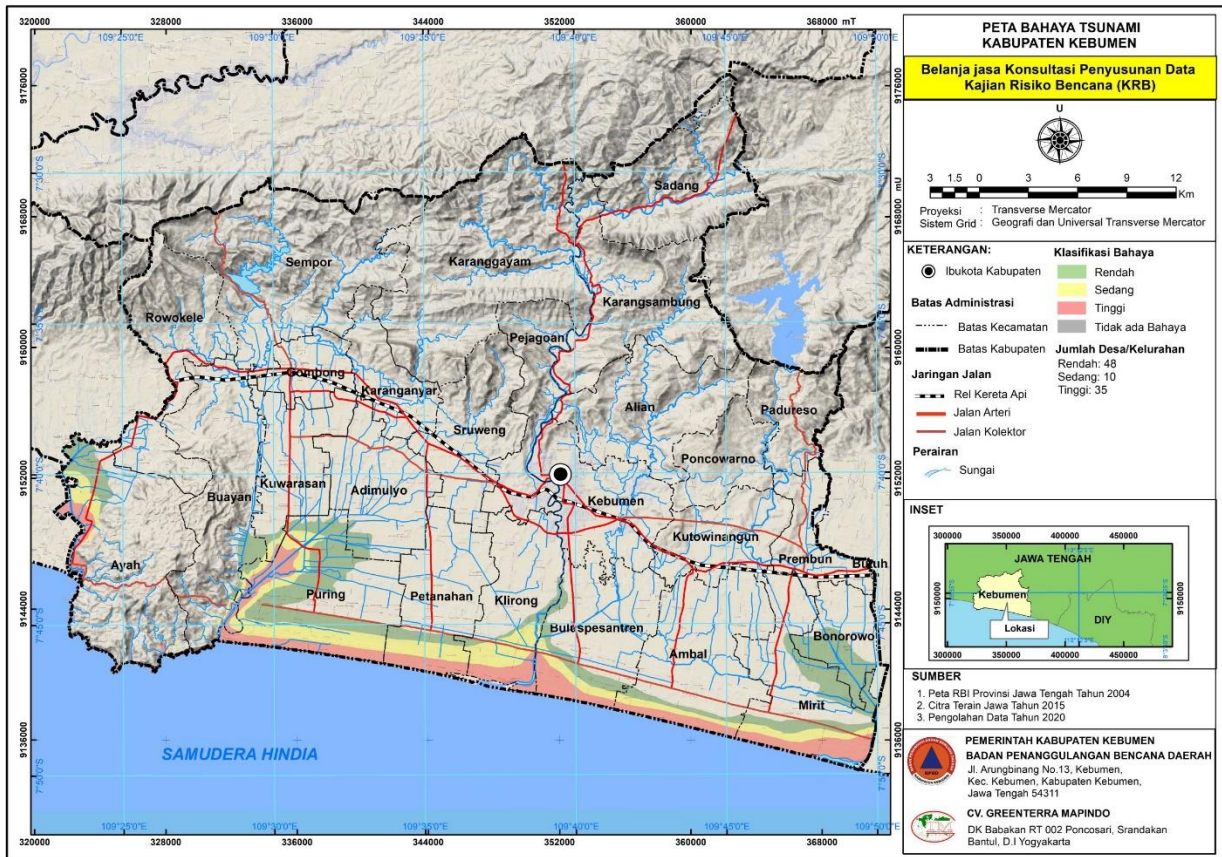
7. Peta Bahaya Kekeringan



8. Peta Bahaya Longsor



9. Peta bahaya Tsunami



BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi tentang Isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Pelayanan Penanggulangan Bencana oleh Bapak Drs. Eko Widiyanto (Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 April 2021

Jam : 12.00 WIB

Tempat : Hotel "MEXOLIE" Kebumen

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026,

MENYEPAKATI :

KESATU	:	Isu strategis Pelayanan Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini
KEDUA	:	Rencana program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA	:	Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KEEMPAT	:	Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

	Sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
KELIMA	: Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 30 April 2021

Pimpinan Sidang

Plt.KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

Menyetujui :

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2	Hani Setyawan	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda	
3	Farita Lestiyat	Unsur Kecamatan	Caurek	
4	PARMIN, SE, MM	Unsur Lembaga		
5	Mulhadinun	Unsur Masyarakat/LSM		